

**STRATEGI PENATAAN PEDAGANG DI KAWASAN
TAMAN KOTA TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial
Program Pendidikan Strata Satu Program Studi
Administrasi Negara**



Oleh:

**MISEL SULASTU NINGSIH
NPM. 220411049**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 21
Bulan : Mei
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

SEKRETARIS



SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117906

1. SARJAN M, S.Sos., M.Si (Pembimbing I) ()
2. RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si (Anggota Penguji I) ()
3. RISVANDI, S.Pd.L, M.Si (Anggota Penguji II) ()



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : STRATEGI PENATAAN PEDAGANG DI
KAWASAN TAMAN KOTA TELUK KUANTAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NAMA : MISEL SULASTU NINGSIH
NPM : 220411049
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I


SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

PEMBIMBING II


SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117906

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi


ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Misel Sulastu Ningsih
NPM : 220411049
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Administrasi Negara
Universitas : Islam Kuantan Singingi

Menyatakan bahwa, sesungguhnya skripsi ini yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain atau sumber lain, telah saya tulis orang lain dengan mencantumkan sumber orang lain dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 13 Maret 2026



MISEL SULASTU NINGSIH
NPM. 220411049

MOTTO

*Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan
(Q.S Al-Insyirah : 5)*

*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum Mereka
mengubah keadaan diri Mereka sendiri
(Q.S Ar-Rad : 11)*

*Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan.
lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang
kau harapkan
(Maudy Ayunda)*

KATA PERSEMBAHAN

Assalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sebuah ucapan rasa syukur “Alhamdulillah” penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang memberikan segala bentuk nikmat dan karunia-Nya kepada hambanya untuk melihat dan menyaksikan kebesaran serta keagungan-Nya terutama untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan dan penelitian skripsi ini dengan petunjuk dan keredhoan-Nya yang pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua penulis teruntuk **Ayahanda Hendri, Ibunda Eli Marlina dan Papa Adi Marjoni**, permata hati yang dititipkan Tuhan untuk membantuku mengarungi deras arus kehidupan. Akan terasa sulit hidup ini tanpa kehadiranmu. Selalu ku rayu Tuhan agar diberikannya kalian umur yang panjang. Aku selalu dididik dan dibina, selalu kuberharap agar ketulusan itu dihadiahi sepotong Surga oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Hari ini, kuhadiahkan gelar S.Sos ini sebagai bentuk bakti syukurku. Bujuklah Tuhan agar Ia memberikan ketegaran di dalam relung jiwaku, agar tiap langkah ku dipermudah hingga diri ini dapat menghadiahi kalian kesuksesan dan kemudahan hidup, untuk menjalani sisa waktu yang ditakdirkan untuk kita, sebelum kembali menghadap-Nya dengan hati yang penuh bahagia.

Serta ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Kakak Perempuan penulis, **Mirahayu Prastiwi, SE**, terimakasih telah kebersamaan penulis selama ini dan terimakasih atas pengorbanan, perjuangan, serta kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.

Tak lupa Adikku tercinta **Meinara Nur Adina**, terimakasih selalu menemani penulis dengan kelucuanmu, tumbuhlah menjadi versi paling hebat adikku.

Billahi fi Sabili al-haq, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang telah memberikan kekuatan dan kelapangan pikiran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan Shalawat dan salam, *allahummasali'ala muhammad wa'ala ali muhammad*, semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke jalan yang terang benderang untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Strategi Penataan Pedagang di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi”** tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap sosial pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini, kepada:

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I.,M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Sarjan M, S.Sos.,M.Si , selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial serta selaku pembimbing I yang telah banyak memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Alsar Andri, S.Sos.,M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi serta selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, saran serta motivasi kepada penulis.
4. Bapak Sahri Muharam, S.Sos.,M.Si, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan dorongan semangat, saran dan masukan serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
 6. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu Dinas Koperasi UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi serta para pedagang di kawasan Taman Kota Teluk Kuantan dihaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap dukungan, serta data yang telah bapak-bapak dan ibu-ibu berikan kepada penulis.
 7. Terima kasih juga disampaikan kepada keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti.
 8. Terima kasih kepada sahabat penulis “Manphusoes” yang telah menemani setiap proses, berbagi cerita, dan membuat perjalanan ini terasa lebih ringan.
 9. Serta terima kasih juga untuk rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu
 10. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri Misel Sulastu Ningsih yang mau terus belajar, berproses menjadi lebih baik, dan bertahan di masa-masa sulit. Terima kasih telah berusaha memberikan yang terbaik di setiap langkah serta tetap terbuka untuk hal-hal baru yang sebelumnya terasa asing dan tidak mudah. Pencapaian ini mungkin ditulis hari ini oleh penulis, tetapi kelak penulisan ini akan dibaca dengan rasa bangga dan haru di masa depan sebagai pengingat bahwa segala perjuangan layak diapresiasi.
- Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Teluk Kuantan, 13 Maret 2026

Penulis

MISEL SULASTU NINGSIH
NPM. 22041104

DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PENGESAHAN.....	ii
TANDA PERSETUJUAN	iii
TANDA ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Administrasi Negara.....	10
2.1.2 Teori Daerah dan Otonomi Daerah.....	14
2.1.3 Teori Kebijakan Publik	19
2.1.4 Teori Kebijakan Pemerintah Daerah.....	22
2.1.5 Teori Strategi Pemerintah	26
2.1.6 Teori Manajemen	29
2.1.7 Teori Manajemen Strategi.....	33
2.1.8 Teori Penataan Ruang	36
2.1.9 Teori Tata Kelola Pemerintahan	39

2.1.10 Teori Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	42
2.2. Kerangka Pemikiran.....	46
2.3. Hipotesis	47
2.4. Defenisi Operasional.....	48
2.5. Operasional Variabel	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1. Jenis Penelitian.....	51
3.2. Responden Penelitian.....	52
3.2.1 Populasi	52
3.2.2 Sampel	53
3.2.3 Informan	54
3.3. Sumber Data.....	56
3.3.1 Data Primer.....	56
3.3.2 Data Sekunder	56
3.4. Lokasi Penelitian.....	56
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	56
3.5.1 Kuesioner.....	56
3.5.2 Wawancara	57
3.5.3 Observasi	57
3.5.4 Dokumentasi.....	57
3.6. Metode Analisis Data.....	58
3.6.1 Kuantitatif	58
3.6.2 Kualitatif	59
3.6.3 Metode Campuran	61
3.7. Jadwal Penelitian	63
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	64
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	64
4.1.1 Profil Kabupaten Kuantan Singingi.....	64
4.1.2 Kondisi Geografi Kuantan Singingi	65
4.2 Gambaran Umum Kota Teluk Kuantan	66
4.2.1 Luas Wilayah.....	67

4.2.2 Iklim	68
4.3 Taman Kota Teluk Kuantan.....	68
4.4 Dinas Koperasi UKM, Perdagangan, dan Perindustrian.....	69
4.4.1 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian.....	69
4.5 Struktur Organisasi Dinas Kopdagrin	74
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
5.1 Hasil Kuantitatif.....	75
5.3 Hasil Kualitatif.....	108
5.6 Hasil dan Pembahasan Metode Campuran (<i>Mixed Method</i>).....	131
5.7 Interpretasi Keseluruhan	134
BAB VI PENUTUP	136
6.1 Kesimpulan	136
6.2 Saran	136
DAFTAR PUSTAKA.....	138

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Operasional Variabel Penelitian Strategi Penataan Pedagang Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.....	50
Tabel 3.1 Jumlah Pedagang di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.....	53
Tabel 3.2 Sampel Dari Jumlah Populasi Pedagang di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.....	54
Tabel 3.3 Jumlah Informan Penelitian Strategi Penataan Pedagang di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.....	55
Tabel 3.4 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Strategi Penataan Pedagang di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.....	55
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian Strategi Penataan Pedagang di Kawasan Taman Jalur Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	63
Tabel 5.1 Identitas Responden dilihat dari jenis kelamin.....	75
Tabel 5.2 Identitas Responden dilihat dari Tingkat Umur	76
Tabel 5.3 Identitas Responden dilihat dari Tingkat Pendidikan.....	77
Tabel 5.4 Tanggapan Responden Terhadap Pertanyaan Sejauh Mana Tujuan Penataan Pedagang Disampaikan Secara Jelas Oleh Pemerintah Kepada Pedagang	78
Tabel 5.5 Tanggapan Responden Terhadap Pertanyaan Sejauh Mana Tujuan Penataan Pedagang Diarahkan Untuk Menciptakan Ketertiban, Keindahan, Dan Kenyamanan Taman	79
Tabel 5.6 Rekapitulasi Indikator Tujuan (<i>Purpose</i>) Dalam Penataan Pedagang Di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.....	80

Tabel 5.7	Tanggapan Responden Terhadap Pertanyaan Sejauh Mana Sosialisasi Penataan Pedagang Dilakukan Sebelum Kebijakan Diterapkan	83
Tabel 5.8	Tanggapan Responden Terhadap Pertanyaan Sejauh Mana Petugas Lapangan Melaksanakan Arahan Penataan Pedagang Sesuai Dengan ketentuan	84
Tabel 5.9	Rekapitulasi Indikator Pengarahan (<i>Direction</i>) Dalam Strategi Penataan Pedagang Di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.....	85
Tabel 5.10	Tanggapan Responden Terhadap Pertanyaan Sejauh Mana Pemerintah Daerah Telah Menetapkan Zonasi Yang Jelas Bagi Pedagang Di Kawasan Taman.....	88
Tabel 5.11	Tanggapan Responden Terhadap Pertanyaan Sejauh Mana Proses Relokasi Dan Konsistensi Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Di Kawasan Taman.....	89
Tabel 5.12	Rekapitulasi Indikator Tindakan (<i>Action</i>) Dalam Strategi Penataan Pedagang Di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	90
Tabel 5.13	Tanggapan Responden Terhadap Pertanyaan Sejauh Mana Penataan Pedagang Memengaruhi Kondisi Sosial Dan Ekonomi Pedagang.....	93
Tabel 5.14	Tanggapan Responden Terhadap Pertanyaan Sejauh Mana Kondisi Taman (Kebersihan, Fasilitas, Kenyamanan) Jadi Lebih Tertata Setelah Penataan Dilakukan	94
Tabel 5.15	Rekapitulasi Indikator Lingkungan (<i>Environment</i>) Dalam Strategi Penataan Pedagang Di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.....	95
Tabel 5.16	Tanggapan Responden Terhadap Pertanyaan Sejauh Mana Pemerintah Melakukan Evaluasi Terhadap Kebijakan Penataan Pedagang.....	98

Tabel 5.17	Tanggapan Responden Terhadap Pertanyaan Sejauh Mana Pemerintah Daerah Melakukan Penyesuaian Kebijakan Penataan Pedagang Berdasarkan Kondisi Dilapangan	99
Tabel 5.18	Rekapitulasi Indikator Pembelajaran (<i>Learning</i>) Dalam Strategi Penataan Pedagang Di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.....	100
Tabel 5.19	Rekapitulasi Semua Indikator Strategi Penataan Pedagang Di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.....	103
Tabel 5.20	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	108
Tabel 5.21	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	109
Tabel 5.22	Identitas Responden Berdasarkan Umur	109

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kondisi Taman Sebelum Relokasi	3
Gambar 1.2 Kondisi Taman Setelah Relokasi.....	3
Gambar 1.3 Lokasi dan Kondisi Pasar Lumpur	4
Gambar 1.4 Lokasi dan Kondisi Pulau Bungin.....	5
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Strategi Penataan Pedagang di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.....	47
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi	65
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM, Perdagangan, dan Perindustrian.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Daftar Koesioner Penelitian137
Lampiran 2	Daftar Wawancara Penelitian141
Lampiran 3	Rekap Teli Penelitian142
Lampiran 4	Dokumentasi Penelitian.....143
Lampiran 5	Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial144
Lampiran 6	Surat Balasan Riset Penelitian.....145
Lampiran 7	Catatan Bimbingan Proposal dan Skripsi146
Lampiran 8	Lembar Persetujuan Pembimbing Untuk Revisi Proposal151
Lampiran 9	Lembar Persetujuan Pembimbing Untuk Revisi Skripsi152
Lampiran 10	Daftar Riwayat Hidup Penulis.....153

STRATEGI PENATAAN PEDAGANG DI KAWASAN TAMAN KOTA TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**MISEL SULASTU NINGSIH
NPM 220411049**

ABSTRAK

Penataan pedagang di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menciptakan kawasan taman yang tertib, indah, dan nyaman sebagai ruang publik bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi penataan pedagang di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode *mixed method* yaitu gabungan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Responden dalam penelitian ini adalah 31 orang pedagang, sedangkan informan penelitian berjumlah 2 orang yaitu Kepala Dinas dan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penataan pedagang di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan berada pada kategori cukup baik.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah Daerah, Penataan Pedagang, Ruang Publik

**STRATEGY FOR ARRANGING STREET VENDORS IN THE TELUK
KUANTAN CITY PARK AREA, KUANTAN SINGINGI REGENCY**

**MISEL SULASTU NINGSIH
NPM 220411049**

ABSTRACT

The arrangement of street vendors in the Teluk Kuantan City Park area, Kuantan Singingi Regency, is an effort by the local government to create a park environment that is orderly, attractive, and comfortable as a public space for the community. This study aims to examine and analyze the strategy for arranging street vendors in the Teluk Kuantan City Park area, Kuantan Singingi Regency. This research applied a mixed-method approach, combining quantitative and qualitative methods. The respondents in this study consisted of 31 street vendors, while the informants were 2 key officials, namely the Head of the Department and the Head of the Trade Division of the Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Trade, and Industry of Kuantan Singingi Regency. Data were collected through Questionnaire, Interview, Observation, and Documentation. The result indicates that the strategy for arranging street vendors in the Teluk Kuantan City Park area can be categorized as fairly good.

Keywords: *Local Government Strategy, Vendor Arrangement, Public Space*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penataan Ruang publik merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Ruang publik berfungsi tidak hanya sebagai ruang sosial yang mendukung interaksi antarwarga dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, penataan ruang menjadi instrumen strategis bagi pemerintah daerah untuk mengatur keseimbangan antara fungsi sosial, estetika lingkungan, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang merupakan sistem proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang agar tercipta keterpaduan antarfungsi ruang serta menjamin keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

Taman Kota Teluk Kuantan yang sering di sebut dengan Taman Jalur merupakan salah satu ikon kebanggaan masyarakat Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, tetapi juga menjadi pusat interaksi sosial, tempat rekreasi, serta ruang ekonomi masyarakat. Setiap sore dan malam hari, taman ini selalu dipadati oleh masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari anak muda sampai dengan orang tua dari berbagai kalangan. Di sisi lain, ramainya aktivitas di kawasan taman tersebut juga menarik perhatian para pedagang untuk membuka lapak di sekitar area taman.

Keberadaan pedagang di kawasan Taman Kota Teluk Kuantan ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, mereka berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat bawah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat

kecil, dan khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke sektor formal.

Namun seiringnya waktu, meningkatnya jumlah pedagang yang berjualan tanpa penataan yang baik dan jelas justru menimbulkan berbagai permasalahan baru. penempatan pedagang yang tidak teratur dan tidak tertib sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti terkait dengan ketertiban, kebersihan, dan berkurangnya fungsi taman sebagai ruang publik. Penataan pedagang semakin penting ketika Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian mulai melakukan strategi penertiban, pendataan, zonasi, hingga relokasi pedagang ke lokasi baru. Strategi ini merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mencapai tujuan (*purpose*) penataan, yakni menciptakan keteraturan ruang publik dan menjaga estetika kota.

Meski demikian, implementasi strategi tersebut menimbulkan dinamika yang cukup kompleks. Pemerintah menegaskan bahwa Taman sejak awal bukan diperuntukkan untuk aktivitas jual beli. Bahkan, Satpol PP Kuansing menyatakan bahwa penertiban dilakukan setelah berbagai bentuk pengarahan seperti sosialisasi dan pendekatan kekeluargaan bahwa aspek pengarahan dan komunikasi kebijakan belum sepenuhnya diterima oleh pedagang.

Di sisi lain, pedagang justru merasakan dampak berat dari kebijakan relokasi tersebut. Dalam pemberitaan Kilas Riau, pedagang menyebut relokasi sebagai bentuk “hukuman ekonomi”, karena lokasi baru sangat sepi pengunjung. Bagi pedagang yang bergantung pada omzet harian, kurangnya pembeli di lokasi baru mengancam keberlangsungan hidup mereka. Kondisi ini menggambarkan

bagaimana tindakan pemerintah dalam penataan belum sepenuhnya memperhatikan aspek keberlanjutan ekonomi masyarakat kecil.

Situasi tersebut menciptakan dilema antara penataan kota dan keadilan sosial. Sebagaimana solusi win-win karena penertiban yang terlalu keras dapat mengorbankan kelompok rentan. Pandangan masyarakat bahwa pedagang “hanya ingin mencari makan” menunjukkan bahwa kebijakan belum mampu menciptakan kementraman antara pemerintah, pedagang, dan pengunjung. Konflik yang muncul juga menggambarkan menurunnya kenyamanan ruang publik bagi semua pihak.



Gambar 1.1 : Kondisi Taman Sebelum Relokasi



Gambar 1.2 : Kondisi Taman Setelah Relokasi

Dapat dilihat pada gambar 1.1 dan gambar 1.2 setelah pedagang di relokasi ke pasar lumpur dan pulau bugin, taman menjadi lebih tertata. Area taman tampak lebih bersih, rapi, dan memiliki nilai estetika yang baik. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pemerintah untuk menjadikan Taman sebagai ruang terbuka hijau dan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat.



Gambar 1.3 : Lokasi dan Kondisi Pasar Lumpur

Pasar lumpur adalah tempat yang menjadi lokasi untuk relokasi para pedagang di kawasan Taman Jalur. Pedagang yang dipindahkan ke lokasi ini mengeluhkan beberapa kondisi, pasalnya lokasi yang ditempati oleh pedagang ini masih jalan tanah dan bebatuan juga sarana prasarana bisa dibilang masih kurang, bila hujan lokasi ini akan becek kondisi itu juga yang membuat pengunjung ataupun pembeli enggan masuk untuk membeli dagangan mereka, bahkan di berita info kuansing menyatakan bahwa mereka yang berjualan sampai malam hanya membawa uang Rp. 20.000 sampai Rp. 50.000 sampai malam.



Gambar 1.4 : Lokasi dan Kondisi Pulau Bungin

Lokasi relokasi kedua ada di pulau bungin, tempat ini memang lebih baik daripada di pasar lumpur. Dilihat dari akses jalan yang memadai, namun pedagang mengeluh dan tidak mau di pindahkan ke pulau bungin karena minimnya pengunjung atau pembeli disebabkan akses lokasi yang jauh sehingga pengunjung juga enggan berbelanja selain itu alasan pedagang tidak mau dipindahkan ke lokasi ini karena dikhawatirkan saat air sungai batang kuantan naik lokasi ini bisa terkena banjir yang ujungnya membuat para pedagang kesulitan. Pulau bungin ini adalah tempat relokasi pedagang dari taman kota yang mana lokasi ini dikelilingi naungan pohon-pohon besar, seperti pohon beringin, menyimpan dimensi risiko kesehatan yang perlu diperhatikan.

Secara ilmiah, pada malam hari tumbuhan seperti pohon beringin melakukan respirasi dengan menyerap oksigen (O_2) dan mengeluarkan karbon dioksida (CO_2). Dalam kondisi sirkulasi udara yang buruk akibat penataan lapak pedagang yang terlalu rapat atau tertutup, akumulasi CO_2 ini secara medis dapat memicu sakit kepala atau pusing, sesak napas, hingga pingsan bagi individu yang berada di bawahnya dalam waktu lama. Meskipun fenomena meninggalnya

seseorang dibawah pohon beringin sering kali dianggap sebagai mitos atau kepercayaan lokal, fakta biologis mengenai sirkulasi oksigen ini menjadi alasan krusial mengapa penataan ruang publik tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek estetika, tetapi juga aspek kesehatan lingkungan dan keamanan bagi pengunjung maupun pedagang itu sendiri.

Oleh karena itu, penataan pedagang menjadi semakin penting bukan hanya untuk ketertiban, tetapi sebagai upaya Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam menciptakan zonasi yang menjamin sirkulasi udara dan ruang gerak yang sehat. Strategi penataan yang tepat diharapkan dapat memitigasi risiko lingkungan tersebut, sehingga Taman Kota dapat benar-benar berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang nyaman dan aman bagi publik di segala waktu.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penataan pedagang di kawasan Taman Kota belum optimal. kenyataan di lapangan memperlihatkan banyak pedagang kembali ke area Taman karena alasan minimnya aktivitas ekonomi di tempat relokasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain strategi dan implementasi di lapangan. Padahal, sebagaimana ditunjukkan Mulgan (2009), strategi publik harus mampu mengintegrasikan kekuasaan dan pengetahuan untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan berpihak pada kepentingan publik secara adil. Sementara soemendar (1985), menekankan pentingnya mempertimbangkan ketentraman, kebutuhan masyarakat, dan kondisi sosial dalam setiap kebijakan penataan.

Namun, hasilnya belum menunjukkan perubahan yang signifikan, masih banyak pedagang yang kembali ke lokasi semula, lemahnya koordinasi

antarinstansi, serta rendahnya partisipasi pedagang dalam proses penataan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan efektif.

Menurut Winarno (2018) strategi penataan pedagang harus mempertimbangkan tiga aspek utama yaitu diantaranya legalitas, lokasi, dan pemberdayaan. Ia menekankan bahwa penataan tidak cukup hanya dengan menggunakan pendekatan represi, tetapi menurutnya harus dilandasi dengan dua pendekatan lainnya yaitu pendekatan partisipatif dan edukatif. Sementara itu, menurut Suharto (2020), penataan pedagang yang berhasil itu umumnya bisa ditandai dengan adanya suatu koordinasi dari lintas sektor, dukungan regulasi yang jelas, dan pelibatan aktif komunitas pedagang dalam proses pengambilan suatu kebijakan.

Menurut Andriani (2021), Ia mengungkapkan bahwa strategi pedagang ini akan berhasil apabila suatu pemerintah bisa menerapkan suatu pendekatan kolaboratif yang akan melibatkan pedagang langsung sejak tahap perencanaan. Ia juga mengungkapkan betapa pentingnya keberpihakan kebijakan terhadap suatu kelompok rentan tanpa mengabaikan ketertiban dan fungsi ruang publik. Hal ini sangat relevan untuk dikaji dalam konteks di Kota Teluk Kuantan, di mana hubungan antara pemerintah dan pedagang masih cenderung bersifat top-down.

Berdasarkan kondisi di atas, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana strategi Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Selanjutnya disingkat Dinas Kopdagrin) dalam penataan pedagang di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, dilihat dari aspek tujuan, pengarahannya, tindakan, lingkungan, dan Pembelajaran yang menjadi

indikator dalam penelitian ini. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran sejauh mana strategi penataan pedagang telah sesuai dengan prinsip tata ruang, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat kecil.

Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada upaya penataan pedagang oleh Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam rangka menciptakan ruang publik yang berfungsi optimal bagi seluruh masyarakat tanpa mengabaikan keberlangsungan ekonomi pedagang kecil.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari judul penelitian ini adalah **“Bagaimana Strategi Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Dalam Penataan Pedagang Di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah **“Untuk Mengetahui Bagaimana Strategi Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Dalam Penataan Pedagang Di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi”**

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

1.4.1.1 Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis sendiri untuk memperluas dan memperdalam wawasan mengenai strategi Dinas Kopdagrin dalam penataan pedagang agar terciptanya ruang publik yang tertata.

1.4.1.2 Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai masalah yang sama.

1.4.2 Aspek Praktis

1.4.2.1 Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis bagi penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan ilmu dan teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai strategi pemerintah daerah dalam penataan pedagang.

1.4.2.2 Dengan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan gambaran bagi Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian dalam memperbaiki strategi penataan pedagang selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Secara *etimologis*, administrasi berasal dari bahasa latin *Ad* dan *Ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pengelolaan”.

Administratie dalam bahasa Belanda yang kita kenal sejak awal masuknya pengaruh sistem administrasi public klasik mencakup pengertian *stellmatige verkrijging, en verwerking van gegevens* (dalam bahasa indonesia disebut tata usaha atau adminisrasi dalam arti sempit) dan *bestuur en beheer*. *Bestuur* adalah manajemen akan kegiatan organisasi dan *Beheer* adalah manajemen akan sumber dayanya (finansial, personel, materil, gedung dan sebagainya).

Administration yang berasal dari bahasa Inggris sering kita sebut sebagai administrasi dalam arti luas, yakni proses (rangkaian) kegiatan usaha kerjasama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.

Menurut Nugraha dkk (2022 : 100), Administrasi Negara merupakan sebuah sistem yang dipakai suatu negara guna membantu pemerintahan dalam melengkapi keperluan masyarakat. Pada kehidupan modern ini, negara lebih mengarah untuk berusaha memenuhi keperluan masyarakat, terutama dalam permasalahan pelayanan kesejahteraan rakyat, maka dibutuhkan adanya administrasi negara untuk melaksanakan tugas-tugasnya tersebut.

Menurut Dimock (dalam Nugraha 2022 : 15), Administrasi juga termasuk bagian dari proses politik. Hal itu dapat dilihat melalui ilmu yang dipelajari mengenai kekuasaan dari suatu organisasi atau kelembagaan politik dari suatu negara serta proses kegiatan ketatanegaran yang dapat berjalan sesuai dengan tujuan tertentu.

Sehingga konsep dari administrasi negara adalah proses atau tindakan kerjasama aparatur negara dengan mengatur dan menjalankan kebijakan pelayanan secara efektif dan efisien kepada publik. Praktik-praktik manajemen juga diterapkan di dalam administrasi negara, hal ini didasari agar dalam pelayanan terhadap publik sesuai dengan nilai efesiensi dan efektivitas sehingga adanya kepuasan dan balasan positif juga demi pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan baik. Administrasi tidak hanya mengacu pada membuat kebijakan publik namun juga menaruh perhatian pada implementasi kebijakan tersebut terhadap pelayanan masyarakat dan permasalahan publik.

Adapun tujuan administrasi publik mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari administrasi publik:

- a. Mewujudkan keadilan sosial, merupakan tujuan utama dari administrasi publik, karena hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang adil dan merata.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, merupakan tujuan utama dari administrasi publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

- c. Mendorong partisipasi masyarakat, merupakan tujuan utama dari administrasi publik, yang berfungsi untuk melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan.
- d. Menjamin transparansi dan akuntabilitas, merupakan tujuan utama dari administrasi negara yang bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Definisi dan ruang lingkup administrasi negara menurut Al-Atti (dalam Hildawati dkk, 2024 : 2), telah mengalami transformasi substansial sebagai respons terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan tata kelola. Administrasi publik mengacu pada operasi yang bermanfaat secara sosial yang mencakup berbagai entitas, seperti badan negara dan pemerintah daerah, dengan tujuan mencapai tata kelola yang efektif dan penyediaan layanan publik.

Ruang lingkup administrasi publik adalah konsep yang luas dan mencakup berbagai aspek dari pengelolaan sektor publik. Berikut adalah beberapa pendapat ahli yang relevan dalam menggambarkan cakupan administrasi publik dan ruang lingkungannya:

1. L. D. White (Stiglitz & Wallsten, 2000)
 - a. Pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik
 - b. Pengaturan dan pengawasan kebijakan publik
 - c. Penganggaran dan pengelolaan keuangan negara
 - d. Pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan oleh lembaga legislatif
2. Woodrow Wilson (Wilson, 1887)
 - a. Implementasi kebijakan publik tanpa campur tangan politik

- b. Manajemen sumber daya publik secara ilmiah
 - c. Pengaturan birokrasi dan manajemen administrasi yang efektif
3. Henri Fayol (Mintzberg, 1973)
 - a. Perencanaan (*planning*)
 - b. Pengorganisasian (*organizing*)
 - c. Penempatan pegawai (*staffing*)
 - d. Pengarahan (*directing*)
 - e. Koordinasi (*coordinating*)
 - f. Pelaporan (*reporting*)
 - g. Penganggaran (*budgeting*)
 4. Simon dan March (simon, 1947)
 - a. Pengambilan keputusan dalam kondisi kompleks dan tidak pasti
 - b. Manajemen konflik dan negosiasi dalam organisasi publik
 - c. Pengaturan kelembagaan dan struktur organisasi yang mendukung pengambilan keputusan
 5. Max Weber (Weber, 1947)
 - a. Birokrasi yang mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah
 - b. Prosedur formal yang mengatur proses administrasi dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat
 - c. Hierarki otoritas yang jelas dan tegas dalam organisasi pemerintahan
 - d. Pengambilan keputusan yang rasional berdasarkan aturan, bukan preferensi individu
 6. *New Public Administration* (NPA) (Marini, 1971:Denhardt, 2015)

- a. Pemberdayaan masyarakat dan kelompok yang terpinggirkan
 - b. Responsivitas administrasi terhadap masalah sosial dan ekonomi
 - c. Peran aktif administrasi publik dalam memecahkan masalah ketidakadilan sosial
7. *New Public Management* (NPM), (Hood, 1991; Pollitt & Bouckaert, 2017)
- a. Pengukuran kinerja dan evaluasi hasil kebijakan
 - b. Desentralisasi dan pemberian otonomi lebih besar kepada unit-unit pemerintah lokal
 - c. Penerapan praktik manajerial dan sektor swasta, seperti efisiensi biaya dan kualitas pelayanan publik
 - d. Privatisasi atau *outsourcing* beberapa layanan publik
8. *Governance dan Administrasi Publik Kontemporer* (Ketti, 2002)
- a. Kemitraan antara pemerintah dan sektor non-pemerintahan dalam penyediaan layanan publik
 - b. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan
 - c. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasi
 - d. Pengelolaan yang baik dan efisien melalui teknologi informasi (*e-governance*)

2.1.2 Daerah dan Otonomi Daerah

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja (2002 : 76), Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Daerah Otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas medebewind atau asas pembantuan. Proses dari sentralisasi ke desentralisasi ini pada dasarnya tidak semata-mata desentralisasi

administratif, tetapi juga bidang politik dan sosial budaya. Dengan demikian dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi/administratif lembaga pemerintahan daerah saja, akan tetapi berlaku juga pada masyarakat (publik), badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang.

Dengan otonomi ini terbuka kesempatan bagi Pemerintah Daerah secara langsung membangun kemitraan dengan publik dan pihak swasta daerah yang bersangkutan dalam berbagai bidang pula. Otonomi Daerah tidak dipandang semata-mata sebagai hak dan wewenang tetapi lebih merupakan kewajiban dan tanggung jawab, sehingga bagi daerah dituntut mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan ketatalaksanaan, kualitas personal (birokrat), kelayakan organisasi dan kecanggihan administrasi.

Peranan masyarakat dan swasta dalam pembangunan Daerah akan semakin besar dan menentukan. Perlu kita sadari tanpa meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta, otonomi akan kehilangan makna dasarnya. Melalui otonomi, Pemerintah Daerah mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendorong dan memberi motivasi membangun daerah yang kondusif, sehingga akan munculnya kreasi dan daya inovasi masyarakat yang dapat bersaing dengan daerah lain. Disamping itu daerah dapat membangun “Pusat Pertumbuhan Daerah, mengingat daerah lebih akrab dengan masyarakat dan lingkungannya.

Dalam penjelasan umum Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang dikemukakan bahwa daerah provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administratif. Dengan kata lain daerah provinsi dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi

dilaksanakan secara meluas di tingkat provinsi dan secara terbatas di tingkat kabupaten/kota, terutama untuk kewenangan yang mutlak berada di tangan pemerintah pusat.

Tidak boleh mengabaikan bahwa ada prasyarat yang harus dipenuhi sebagai daerah otonom, yaitu:

1. adanya kesiapan SDM Aparatur yang berkeahlian
2. adanya sumber dana yang pasti untuk membiayai berbagai urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai kebutuhan dan karakteristik Daerah.
3. tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan Pemerintah Daerah
4. bahwa Otonom Daerah yang diterapkan adalah otonomi daerah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli:

1. Menurut F. Sugeng Istianto: Otonomi Daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah.
2. Menurut Syarif Saleh: Otonomi Daerah merupakan hak yang mengatur serta memerintah daerahnya sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat.
3. Menurut Kansil: Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri sesuai perundang-undangan yang masih berlaku.

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan dalam otonomi daerah, daerah dibagi atas daerah-daerah provinsi

dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan dilaksanakan dengan cara pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat.

dapat dikemukakan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya adalah :

1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah; penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan dan pertanggungjawaban daerah sendiri, maka hak itu dikembalikan kepada pihak yang memberi, dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah (pusat);
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya;
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya;

Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus

rumah tangga daerah lain. Dengan demikian suatu daerah otonom adalah daerah yang *self government*, *self sufficiency*, *self authority*, dan *self regulation* maupun horisontal karena daerah otonom memiliki *actual independence*. Indikator suatu daerah menjadi otonom setelah melaksanakan kebijakan otonomi daerah meliputi makna daerah itu telah secara nyata menjadi satuan masyarakat hukum, satuan unit ekonomi publik, satuan unit sosial budaya, satuan unit lingkungan hidup (lebensraum) dan menjadi satuan subsistem politik nasional.

2.1.3 Teori Kebijakan Publik

Menurut Ibrahim (2024 : 1), Kebijakan publik merupakan pernyataan atau justifikasi pemerintah terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah di rumuskan untuk menyikapi, mengatasi dan sekaligus mengatasi masalah berbagai hal yang timbul dan atau terkait dengan dinamika masalah masyarakat. Kebijakan adalah suatu tindakan dalam pengambilan suatu keputusan, kebijakan ini terdiri dari peraturan yang tertulis kebijakan itu suatu peraturan atau kegiatan maupun program yang di kerjakan oleh pemerintah ataupun tidak dikerjakan oleh pemerintah.

Istilah kebijakan publik telah sering diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam kuliah-kuliah ilmu sosial politik, ekonomi, dan hukum. Dilihat dari aspek sejarah perkembangannya, pengertian kata *public* muncul dari kata dua sumber. Pertama, berasal dari Bahasa Yunani, *pubes*, bermakna kedewasaan, atau kedewasaan fisik, emosional, maupun intelektual. Dalam khazanah sosiologi dan psikologi, *pubes* kemudian diistilahkan menjadi puber dimengerti sebagai suatu tahapan

kehidupan sosial seorang manusia, yaitu masa transisi yang ditandai dengan adanya perubahan seorang individu dari awalnya mementingkan diri sendiri (*self-contered individualis*) ke arah usaha memandang dan memperhitungkan orang-orang diluar dirinya.

Menurut Anderson (dalam Ibrahim 2024 : 2), Anderson memandang kebijakan publik sebagai :

“A purposive course of action followed by an an actor or set actors in dealing with a problem or matter of concern”

Dalam bahasa yang sederhana, kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok *actor* yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Pemahaman substansi yang lebih luas diutarakan oleh Anderson (1984 : 4) dengan mengatakan :

“Public policy also may be viewed as whatever governments choose to do or not to do”

Pendapat Anderson di atas menunjukkan adanya fungsi tertentu kebijakan seperti misalnya untuk melindungi konsumen. Sementara ini, menurut Anderson kebijakan publik mempunyai beberapa implikasinya:

1. Dalam konteks kebijakan publik mempunyai maksud dan tujuan tertentu, sehingga kebijakan publik dipandang sebagai system politik modern yang direncanakan oleh aktor-aktor system politik.
2. Secara positif, kebijakan adalah tindakan pemerintah yang jelas untuk

mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah, namun tidak mengambil tindakan dan tidak berbuat apa-apa terhadap suatu permasalahan yang memerlukan keterlibatan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk tidak melakukan intervensi di bidang umum maupun khusus.

Menurut Malau dkk, (2024 : 2), Kata kebijakan yaitu “*policy*” artinya pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan termasuk tata cara pemerintahan dan dasar-dasar.

Kebijakan publik menurut Kuswandro (2024), mengacu pada serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh negara untuk mengatasi masalah dan mengelola urusan publik. Kebijakan publik menurut Laswel dan Kaplan, pada hakikatnya merupakan “Suatu keputusan yang sudah mantap atau “*a standing decision*” menyangkut kepentingan umum, oleh pejabat-pejabat pemerintah dan instansi-instansi pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara. Keputusan mana didasarkan pada pilihan-pilihan atau pertimbangan dalam rangka mewujudkan suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana-sarana yang sesuai.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn (dalam Marwiyah 2022 : 14), adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda, merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam proses inilah ada didalam ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam

penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah.

2. Formulasi kebijakan, merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kemudian kebijakan dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik.
3. Adopsi/legitimasi kebijakan, tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga juga harus mendukung pemerintah.
4. Implementasi kebijakan, merupakan kebijakan yang telah diambil, berkoordinasi dan dilaksanakan instansi terkait untuk menegakkan aturan. Pelaksanaan yang berhasil ditandai juga dengan adanya partisipasi langsung dari pihak yang terlibat.
5. Evaluasi kebijakan/penilaian, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

2.1.4 Teori Kebijakan Pemerintah Daerah

Pembuatan kebijakan merupakan semua tahap dalam siklus hidup kebijakan. Siklus hidup atau tahap-tahap dari suatu kebijakan pada dasarnya yaitu dimulai dari perumusan masalah, identifikasi alternatif, implementasi kebijakan

dan kembali pada perumusan masalah.

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004). Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Kebijakan pemerintah daerah adalah kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten atau kota atau desa. Kebijakan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Substansi kebijakan pemerintah daerah dapat bervariasi bergantung pada masalah atau isu yang dihadapi di wilayah tersebut. Namun, umumnya kebijakan pemerintah daerah mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Pembangunan infrastruktur, kebijakan ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan fasilitas umum lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat;
2. Pendidikan, kebijakan ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut, baik melalui pembangunan sekolah baru, peningkatan kualitas guru ataupun bantuan program biaya pendidikan bagi siswa;
3. Kesehatan, kebijakan ini mencakup peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan masyarakat, pembangunan puskesmas atau rumah sakit serta program pencegahan dan penanganan penyakit tertentu;

4. Lingkungan hidup, kebijakan ini mencakup upaya pelestarian lingkungan hidup, penanganan limbah, pengelolaan air dan lahan serta penanganan bencana alam;
5. Pemberdayaan masyarakat, kebijakan ini mencakup program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, bantu modal usaha serta usaha, serta program pengentasan kemiskinan;
6. Pemerataan pembangunan, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah yang maju dan wilayah yang tertinggal dalam hal pembangunan. Kebijakan ini mencakup program pemberdayaan wilayah tertinggal, seperti bantuan pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan ekonomi;
7. Keamanan dan ketertiban, kebijakan ini mencakup upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah tersebut, baik melalui peningkatan keamanan publik maupun penanganan kejahatan maupun tindak kriminal;
8. Perencanaan dan pengendalian, kebijakan ini mencakup pengendalian pembangunan agar sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan, serta upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di wilayah tersebut;
9. Substansi kebijakan pemerintah daerah juga dapat mencakup wilayah khusus yang spesifik untuk wilayah tersebut, seperti pengembangan pariwisata, pengembangan potensi, pertanian atau perikanan serta program kebudayaan dan kesenian.

Beberapa definisi kebijakan pemerintah yang diuraikan dalam buku ajar

mahasiswa prodi ilmu pemerintahan, yaitu:

1. Rae dan Wilde mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai "Serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang". Implikasi dari definisi ini bahwa kebijakan pemerintahan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai dan pilihan pemerintah dan berdampak terhadap banyak orang. Jadi pilihan tindakan oleh pemerintah yang dampaknya hanya dirasakan seorang atau sedikit orang saja, maka ia tidak dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah.
2. Anderson mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai "Kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah". Jadi menurut Anderson, setiap kebijakan pemerintahan selain dapat dikembangkan oleh badan-badan pemerintahan seperti; lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, juga oleh pejabat pemerintah baik di level nasional, regional maupun lokal.

Disini kebijakan pemerintahan itu dapat dikembangkan oleh lembaga atau badan-badan pemerintahan, juga oleh pejabat pemerintah pada lembaga atau badan itu baik di skope nasional, regional dan lokal.

3. David Easton mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai "Pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat". Maksud definisi ini bahwa hanya pemerintahlah yang secara sah dapat memaksakan sesuatu (nilai-nilai) kebijaksanaan/kebijakan kepada masyarakatnya secara keseluruhan.

Menurut Abdoellah & Rusfiana (2016 : 37), Proses kebijakan pemerintah realitanya merupakan tahap-tahap, mulai dari perumusan, implementasi dan evaluasi atau penilaian kebijakan publik. Memang sebelumnya masuk pada kegiatan perumusan kebijakan, dilakukan terlebih dahulu tahap penyusunan agenda (*Agenda Setting*). Sementara sesudah tahap perumusan kebijakan, sebelum masuk pada kegiatan implementasi kebijakan, didahului dengan kegiatan adopsi kebijakan (*policy adoption*).

2.1.5 Teori Strategi Pemerintah

Kata “strategi” berasal dari bahasa yunani yaitu *strategos* yang dapat diterjemahkan sebagai komandan militer pada zaman demokratis Athena. Pengertian strategi menurut Siagian (2012 : 17) adalah rencana berskala besar yang berorientasi jangkaun masa depan yang jauh serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya di arahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan.

Menurut Webster New World Dictionary (dalam Pahlevi & Musa, 2023), strategi adalah ilmu merencanakan serta mengarahkan semua kegiatan-kegiatan militer dalam skala besar dan memanuver kekuatan-kekuatan ke dalam posisi yang paling menguntungkan sebelum bertempur dengan lawannya/musuhnya. Sebuah keterampilan dalam mengelola atau merencanakan suatu strategi atau cara yang cerdas untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Allison (2013 : 3), Strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan

yang luas yang diambil oleh organisasi, strategi juga adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah sebuah keterampilan yang merencanakan suatu strategi dalam skala besar yang berorientasi jangka panjang dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan kedalam posisi yang menguntungkan dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan.

Menurut Mustanir dkk (2023 : 2), Pemerintah adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan proses pelayanan publik, dan memiliki tugas untuk memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam interaksi pemerintah diberikan layanan sipil sehingga mereka dapat diberikan sesuai kebutuhan sesuai dengan kebutuhan yang diperintah. Secara etimologi, pemerintah berarti sebagai berikut:

1. Perintah memiliki makna yaitu melaksanakan kegiatan memerintah (yang terdiri dari dua kelompok yakni yang diberikan perintah serta kelompok yang memberikan perintah)
2. Pemerintah (pe) bermakna lembaga yang menjalankan kekuasaan untuk memberikan perintah
3. Pemerintahan (yang berakhiran an) bermakna perbuatan, metode ataupun urusan pada lembaga yang memberikan perintah tersebut.

Menurut Samuel Edwar Finer (dalam Karso. J. A. 2024 : 8), pemerintah

harus memiliki proses (*processes*), negara bagian (*states*), pejabat pemerintahan (*duties*), dan cara, teknik, dan sistem (*manner, method, and system*) yang berkelanjutan dari pemerintah menuju masyarakat.

Menurut Soemendar (dalam Karso. J. A. 2024 : 8), pemerintah harus mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan, harapan, dan pendapat warga negara, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh lingkungan, pengaturan, dan komunikasi tentang partisipasi dari semua pihak terkait masyarakat.

Ada juga Geoff Mulgan (2009 : 25), yang menyatakan, “*Public strategy is the systematic use of public resource and powers, by public agencies, to achieves public goods*”. strategi yang diutarakan oleh Geoff Mulgan sendiri lebih berbicara mengenai strategi yang diperuntukkan untuk organisasi pembuat kebijakan (pemerintah). Strategi berguna sebagai system yang dapat untuk mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat organisasi publik (pemerintah) yang bertujuan untuk kepentingan publik.

Berdasarkan pengertian diatas, Geoff Mulgan menguraikan strategi pemerintahan ke dalam 5 indikator, yaitu Tujuan (*Purposes*), Pengarahan (*direction*), Tindakan (*Action*), Lingkungan (*Environtment*), Pembelajaran (*Learning*). Peneliti melihat dari kelima indikator tersebut unsur politiknya sangat kuat, untuk membuat suatu kebijakan maupun menjalankan suatu kebijakan tersebut. Strategi yang diutarakan oleh Geoff Mulgan ini jelas berbeda dari strategi perusahaan.

Mulgan menilai ada dua sumber daya utama yang diperlukan dalam proses

desain dan proses implementasinya, diantaranya adalah kekuasaan (*power*) dan ilmu pengetahuan (*knowledge*).

Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk menggunakan teori dan komponen yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan. Kelima teori yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan memiliki pendekatan baik secara politik ataupun pemerintahan dalam membuat dan merancang strategi dan juga dalam mengimplementasikan strategi yang dibuat untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Strategi pemerintah merupakan suatu langkah-langkah yang dirancang dan dibuat oleh lembaga organisasi, dalam hal ini adalah pemerintah yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan demi memajukan dan kemajuan suatu desa maupun kota sehingga diharapkan tercapainya masyarakat yang sejahtera. Pemerintah selama ini tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai dan suatu keberhasilan dari program yang telah pemerintah rencanakan.

2.1.6 Teori Manajemen

Menurut Hoesada (dalam Arifudin dkk, 2020) : 3), manajemen adalah istilah yang bermakna manusia atau kumpulan manusia yang melakukan kegiatan manajemen, yang terpisah dari pekerja (labor) sebagai SDM yang dikelola manajemen. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* berarti kontrol. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan mengendalikan, menangani atau mengelola. Selanjutnya kata benda manajemen dapat mempunyai berbagai arti. Pertama ialah sebagai pengelolaan, pengendalian, atau penanganan (*managing*). Kedua ialah sebagai perlakuan secara terampil untuk menangani sesuatu berupa

skillfull treatment. Ketiga, merupakan gabungan dari pengertian di atas adalah pengelolaan bentuk kerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Stoner (dalam Nawawi 2013 : 7), mendefinisikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner secara jelas menggunakan kata proses dan bukan seni, sebagaimana yang digunakan Follet misalnya, dengan alasan titik tekan manajemen sebagai seni dapat mengandung arti bahwa hal itu merupakan kemampuan atau keterampilan pribadi, sedangkan proses adalah cara sistematis untuk melakukan pekerjaan. Manajemen didefinisikan sebagai proses karena semua pemimpin (manajer), tanpa memandang kecakapan atau keterampilan khusus yang dimiliki, harus melaksanakan kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

Dengan mengutip dari sejumlah sumber yang cukup populer dapat dikemukakan sejumlah definisi yang dirumuskan oleh sejumlah ahli di bidang manajemen J. G. Longenecker mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses kegiatan manajer dalam mengambil keputusan, mengkoordinasikan usaha-usaha kelompok, dan kepemimpinan. Sementara itu Henry L. Sisk mendefinisikan manajemen sebagai koordinasi dari semua sumber (tenaga manusia, dana, material, waktu, metode kerja, dan tempat) melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian supaya dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Adapun fungsi-fungsi manajemen menurut beberapa penulis yang dikutip oleh Nawawi (2013 : 15) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemerintahan menjelaskan fungsi manajemen itu dijabarkan menjadi 10 fungsi yaitu:

1. *Forecasting* (ramalan), yaitu kegiatan meramalkan, memproyeksikan terhadap kemungkinan yang akan terjadi bila sesuatu dikerjakan.
2. *Planning* (perencanaan), yaitu penentuan serangkaian tindakan dan kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan.
3. *Organizing* (organisasi), yaitu pengelompokkan kegiatan untuk mencapai tujuan, termasuk dalam hal ini penetapan susunan organisasi, tugas, dan fungsinya.
4. *Staffing* (penyusunan personalia), yaitu penyusunan personalia sejak dari perekrutan tenaga kerja baru, latihan dan pengembangan sampai dengan usaha agar setiap petugas memberi daya guna maksimal pada organisasi.
5. *Directing* (pengarahan), yaitu suatu usaha memberi bimbingan saran-saran dan perintah dalam pelaksanaan tugas masing-masing bawahan (delegasi wewenang) untuk dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
6. *Leading* yaitu pekerjaan manajer untuk meminta orang lain agar bertindak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
7. *Coordinating* (koordinasi), yaitu menyelaraskan tugas atau pekerjaan dengan jalan dihubungkan, menyatupadukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan.
8. *Motivating* (motivasi), pemberian semangat, inspirasi, dan dorongan

kepada bawahan agar mengerjakan kegiatan yang telah ditetapkan secara sukarela.

9. *Controlling* (pengawasan), yaitu penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilakukan sesuai dengan tujuan.

10. *Reporting* (pelaporan), yaitu penyampaian hasil kegiatan baik secara tertulis maupun lisan.

Ada proses manajemen yang dijalankan dalam sebuah organisasi. Organisasi publik erat kaitannya dengan proses manajemen publik, baik secara teori maupun praktik. Organisasi publik harus dikelola dengan manajemen publik, karena orientasi yang dibangun adalah *public service* atau untuk kepentingan publik atau masyarakat.

Dari proses manajemen itu sendiri, menurut Safroni (dalam Hayat 2017 : 9), Adalah suatu siklus, apabila prosesnya berkualitas maka akan menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan yang berimplikasi kepada kinerja. Kinerja aparatur berdampak pada *Output* yang hasilkan menjadi lebih baik dan sesuai dengan harapan.

Dari proses manajemen tersebut akan berdampak kepada kinerja aparatur. Apakah manajemen yang sudah dilakukan sudah baik atau tidak. Hal itu kembali kepada pemimpinnya. Secara prinsip manajemen dilakukan oleh pemimpin yang ditunjukkan kepada aparatur dalam penyelenggaraan organisasi. Aparatur menyelenggarakan proses manajemen sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kesemuanya berjalan secara berkesinambungan sesuai dengan pekerjaan untuk

mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Suksesti organisasi tergantung dari pola kerja sama yang dibangun melalui komunikasi dan koordinasi.

2.1.7 Teori Manajemen Strategi

Menurut Fahmi (dalam Pahlevi & Musa 2023 : 1), Manajemen strategi adalah suatu rencana yang kemudian disusun dan dikelola dengan memperhitungkan berbagai sisi dengan tujuan agar pengaruh rencana tersebut bisa memberikan dampak positif bagi organisasi tersebut secara jangka panjang. Salah satu fokus organisasi tersebut secara jangka panjang.

Menurut Handayani dan Sarwono (2021 : 1), Manajemen strategi (*strategic management*) sebagai suatu rangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana untuk mencapai tujuan perusahaan.

Manajemen strategi terdiri atas tiga tahap yang diuraikan oleh David (2010 : 6), yaitu perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi.

1. Perumusan strategi mencakup pengembangan visi misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan.
2. Penerapan strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan.
3. Penilaian strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategi. Manajer mesti tahu kapan ketika strategi tertentu tidak berjalan dengan

baik. Penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi semacam ini. Semua strategi terbuka untuk dimodifikasi di masa yang akan datang karena berbagai faktor eksternal dan internal terus-menerus berubah.

Manajemen strategi Menurut Ilyas dkk, (2023 : 2), adalah serangkaian tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pemantauan lingkungan, perumusan strategi, (perencanaan strategi atau perencanaan jangka panjang), implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian, ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan.

Adapun banyak definisi manajemen strategi, seperti yang dikemukakan oleh Fred R. David yang di kutip Ilyas dkk dalam bukunya Manajemen strategi adalah seni dan ilmu memformulasi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Thomas L Wheelen dan J. David Hunger (dalam Arifudin dkk, 2020 : 9), manajemen strategis adalah serangkaian keputusan manajerial dan tindakan yang menentukan kinerja jangka panjang dari perusahaan. Ini mencakup pemindaian lingkungan (baik eksternal dan internal) perumusan strategi (strategi atau perencanaan jangka panjang) pelaksanaan dan evaluasi pengendalian strategi.

Model-model manajemen strategi menurut Wheelen and Hunger (dalam Ilyas dkk, 2023 : 15), yaitu:

1. Pemindaian Lingkungan, ini adalah pemantauan, evaluasi, dan pencarian

informasi dari lingkungan eksternal dan internal untuk orang-orang penting di perusahaan. Tujuannya untuk mengidentifikasi faktor strategi eksternal dan internal yang akan menentukan masa depan perusahaan. Salah satu alat yang paling sering digunakan dalam analisis situasi ini adalah SWOT.

2. Perumusan strategi, perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk pengelolaan peluang dan ancaman lingkungan yang efektif, dalam kaitannya dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi meliputi penentuan misi, penentuan tujuan yang dapat dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan.
3. Implementasi strategi, adalah suatu proses dimana manajemen menerapkan strategi dan kebijakannya melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Proses tersebut mungkin melibatkan perubahan keseluruhan budaya, struktur atau sistem manajemen organisasi secara keseluruhan.
4. Evaluasi dan pengendalian, untuk mengukur apa yang dapat dihasilkan atau dicapai oleh perusahaan. Artinya membandingkan kinerja perusahaan dengan hasil yang diharapkan perusahaan disini yang dimaksud pemerintah. Sebagai hasil akhir dari suatu kegiatan, termasuk dalam kinerja adalah hasil aktual dari proses manajemen strategis. Praktik manajemen strategi dibenarkan dalam hal ini stabilitasnya dalam hal peningkatan kinerja perusahaan, terutama yang diukur dengan keuntungan dan pengembalian investasi. Dalam hal ini, manajer harus mencari

informasi yang jelas dan tidak bias dari bawahannya.

Dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen strategik adalah suatu ilmu dalam pembuatan keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak dan di laksanakan oleh seluruh jajaran dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Hal itu akan membentuk sebuah strategi menentukan arah dan langkah-langkah selanjutnya yang akan dipakai untuk kemajuan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemikiran-pemikiran serius dan mumpuni untuk mengatur strategi.

2.1.8 Teori Penataan Ruang

Terkait dengan teori tata ruang meskipun para ahli memiliki cara pandang yang berbeda dalam menjelaskan teori tata ruang, secara substansi pemahaman mereka sebenarnya memiliki kesamaan. tata ruang dengan fokus pada kata “tata” pada dasarnya merupakan proses pengaturan dan penyusunan ruang dalam suatu wilayah atau kawasan agar memenuhi berbagai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi aspek ekonomi, sosial budaya, maupun politi serta menguntungkan bagi perkembangan masyarakat wilayah tersebut.

Penataan ruang kota adalah suatu proses pengaturan tata guna ruang yang mencakup kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang wilayah kota agar tercipta keterpaduan antar fungsi ruang dan antar sektor pembangunan. Penataan ruang merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis kepentingan publik. Menurut Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Tujuan dari penataan ruang adalah menciptakan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Pasal 1 Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, yang dimaksud adalah “wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya”.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 26 tahun 2007 menyatakan bahwa terbagi beberapa kategori, yang diantaranya:

- a. Ruang daratan yaitu ruang yang terletak diatas dan dibawah permukaan daratan, termasuk permukaan perairan daratan dan sisi darat dari garis laut terendah.
- b. Ruang laut yaitu ruang terletak diatas dan dibawah permukaan laut dimulai dari sisi laut dari sisi laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi dibawahnya, dimana indonesia memiliki hak yuridiksinya.
- c. Ruang, ruang adalah ruang yang terletak diatas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah Negara dan melekat pada bumi, dimana Negara Indonesia memiliki hak yuridiksinya.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Pasal 5 menyatakan bahwa penataan ruang dilaksanakan berdasarkan asas keterpaduan, berkelanjutan, keberlanjutan, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, proses penataan ruang seharusnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha kecil seperti pedagang kaki lima.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Pasal 35 tentang Tata Ruang memberikan arahan secara sedaksional yang mana pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Sehingga dengan adanya pasal ini diharapkan segala bentuk kegiatan pembangunan yang memanfaatkan tata ruang di negeri ini dapat sedemikian rupa dapat dikendalikan sesuai dengan rencana kemajuan bangsa.

Menurut Soetami (2012 : 65) dalam bukunya Perencanaan dan Perancangan Kota, penataan ruang kota harus mengintegrasikan kebutuhan fungsi-fungsi kota (permukiman, perdagangan, rekreasi, transportasi, dan ruang hijau) dalam struktur ruang yang efisien dan ramah lingkungan. Penataan ruang tidak semata-mata teknis, tetapi juga bersifat sosial dan politis karena menyangkut hak warga atas ruang. Menurut Robert M. Z. dalam Lawang (2005), menekankan bahwa ruang sosial dalam kota harus dapat menampung berbagai interaksi masyarakat secara harmonis, termasuk interaksi antara kegiatan ekonomi informal dan estetika kota. Lawang menyatakan:

“Ruang kota adalah arena interaksi sosial yang harus diorganisasi secara rasional agar mampu menampung dinamika sosial dan ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan fungsi ekologis dan estetika kota” (Lawang, 2005 : 123).

Menurut apa yang telah peneliti baca, pandangan lawang terhadap pedagang bukan hanya termasuk pelaku ekonomi, tetapi juga bagian dari sistem sosial kota. Penataan mereka harus mempertimbangkan hak atas ruang publik, kebutuhan ekonomi rakyat kecil, dan fungsi taman sebagai ruang terbuka hijau.

Dengan demikian, strategi penataan tidak hanya bersifat fisik (relokasi atau zonasi), melainkan juga menyentuh aspek sosial budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.

Penataan ruang kota merupakan bagian dari perencanaan wilayah yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keseimbangan, dan keberlanjutan lingkungan perkotaan, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun ekologis. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, penataan ruang adalah suatu proses yang meliputi: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam konteks ini yaitu taman kota seperti dalam penelitian ini yaitu taman jalur yang ada di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, ruang ini berfungsi sebagai:

1. Ruang terbuka hijau (RTH)
2. Pusat aktivitas sosial masyarakat
3. Ruang ekonomi informal (tempat aktivitas pedagang)

Namun karena potensi konflik fungsi antara estetika taman yang terganggu dan aktivitas ekonomi informal semakin marak, dibutuhkan strategi yang tepat.

2.1.9 Teori Tata Kelola Pemerintahan

Teori *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik menurut teori yang dikemukakan oleh Miftah Thoha (dalam Arafiq 2025 : 38), *Good Governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik, tertata hubungan yang sinergis dengan masyarakat luas. Masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam proses dan pengambilan keputusan pemerintahan dan pembangunan. *Good Governance* sebagai tata pemerintahan, penyelenggara negara, atau cukup

diartikan dengan penyelenggaraan atau pengelolaan.

Menurut Santoso (dalam Arafiq 2025 : 39), *good governance* adalah cita-cita yang menjadi misi setiap penyelenggara suatu negara, termasuk Indonesia. *Good governance* dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan dan administrasinya bertanggungjawab pada publik. *Good governance* mengandung arti nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional untuk kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, sedangkan *governance* diartikan sebagai cara pengelola urusan-urusan publik.

Good governance menurut Thoha (dalam Arafiq 2025 : 40), bahwa tata kelola pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan *Good governance* merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara reguler dalam ilmu politik dan administrasi publik. Konsep ini hadir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Pada akhir dasa warsa yang lain, konsep *governance* ini lebih dekat dipergunakan dalam reformasi sektor publik.

Pengimplementasian *Good governance* dapat terwujud apabila aparaturnya pemerintah dan institusi publik secara keseluruhan dapat bersikap terbuka terhadap ide dan gagasan baru serta responsif terhadap kepentingan masyarakat. Implementasi *good governance* merupakan pelaksanaan cara berpemerintahan yang baik yang menganut prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, penegakan

hukum, *responsive*, kesetaraan, efektifitas dan efesiensi, serta akuntabilitas yang baik oleh pemerintah maupun diluar pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik seperti yang diharapkan.

Menurut World Bank (dalam Danar 2022 : 20), Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ditandai dengan adanya sistem manajemen pemerintahan yang bertanggung jawab dan selaras dengan nilai-nilai demokrasi serta pelibatan mekanisme pasar secara efisien. Pemerintah yang diberi amanah untuk mengatur kehidupan sehingga memiliki otoritas, di mana dalam *good governance* otoritas tersebut diminimalisir agar tidak ada kekeliruan pengalokasian anggaran, mengoptimalkan pencegahan korupsi, serta dipantau untuk menggerakkan kegiatan usaha masyarakat.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2012 ; 74), bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* terdiri dari :

1. Akuntabilitas

Aparatur pemerintah harus dapat mempertanggung - jawabkan kebijaksanaan, program dan kegiatannya yang dilaksanakan atau dikeluarkannya termasuk pula yang terkait erat dengan pendayagunaan ketiga komponen dalam birokrasi pemerintahan, yaitu kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusianya.

2. Keterbukaan dan transparan (*openness and transparency*)

Masyarakat dan sesama aparatur pemerintah dapat mengetahui dan memperoleh data dan informasi dengan mudah tentang kebijaksanaan, program, dan kegiatan aparatur pemerintahan baik di tingkat pusat maupun

daerah, atau data dan informasi lainnya yang tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang disepakati bersama.

3. Ketaatan pada aturan hukum

Aparatur pemerintah menjunjung tinggi dan mendasarkan setiap tindakannya pada aturan hukum, baik yang berkaitan dengan lingkungan eksternal (masyarakat luas) maupun yang berlaku terbatas di lingkungan internalnya.

4. Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)

“Membangun Pondasi *Good Governance* di Masa Transisi”, MTI, Jakarta, Mei 2000. Dalam perspektif MTI, *good governance* mensyaratkan empat azas, yaitu: transparansi (*transparency*), pertanggungjawaban (*accountability*), kewajaran atau kesetaraan (*fairness*), dan kesinambungan (*sustainability*)

2.1.10 Teori Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan menurut etimologi berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Dengan arti lain pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses untuk menuju berdaya atau proses untuk memperoleh kekuatan serta pemberian kekuatan dari pihak yang memiliki kepada pihak yang sedang di berdayakan. Sedangkan “proses” menuju pada serangkaian tindakan ataupun langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis untuk mencerminkan tahapan upaya dalam mengubah masyarakat yang kurang ataupun belum berdaya menuju pemberdayaan.

Menurut Wardah & Fryanti (2021 : 4), Pemberdayaan dapat dipahami

sebagai suatu proses untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan kecakapan masyarakat agar mencapai tingkat kehidupan yang lebih sejahtera. Dalam proses tersebut terkandung dorongan untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat, sehingga mereka tidak hanya mampu menghadapi permasalahan yang ada, tetapi juga dapat secara mandiri mengoptimalkan potensi yang dimiliki guna memperbaiki kualitas hidupnya. Salah satu bentuk pemberdayaan yang penting ialah pemberdayaan di bidang ekonomi, yang bertujuan memperkuat kondisi perekonomian masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi yang tersedia. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, pendampingan, penyuluhan, dan pendidikan. Kegiatan-kegiatan ini diarahkan pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, serta motivasi masyarakat agar mampu memproduksi secara mandiri, menciptakan nilai tambah ekonomi, dan meningkatkan pendapatan dari sumber daya yang dimiliki.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi, penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang selama ini menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Secara umum, hambatan tersebut meliputi keterbatasan akses terhadap sumber daya, teknologi, pasar, dan permintaan.

Oleh karena itu, program pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu difokuskan pada upaya mengatasi kendala-kendala tersebut, sehingga setelah hambatan tersebut teratasi, aktivitas ekonomi masyarakat dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Dalam konteks ini, pemerintah baik pusat maupun daerah, sektor swasta, serta lembaga swadaya masyarakat memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Model pemberdayaan masyarakat menurut Wardah & Fryanti (2021 : 5), Jack Rothman sebagaimana dikemukakan oleh Harry mengemukakan tiga model utama dalam praktik pemberdayaan.

1. Model pengembangan lokal (*locality development*), yang menitikberatkan pada partisipasi aktif masyarakat secara luas di tingkat lokal, baik dalam proses perumusan tujuan maupun pelaksanaan perubahan.
2. Model perencanaan sosial (*social planning*), yang lebih menekankan pada pendekatan teknis dan rasional dalam memecahkan berbagai permasalahan sosial yang bersifat substantif, seperti masalah perumahan, kesehatan mental, dan kenakalan remaja.
3. Model aksi sosial (*social action*), yang berfokus pada upaya terorganisasi dan sistematis dalam memperjuangkan kepentingan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum. Kedati memiliki sumber daya yang dapat diolah di wilayah mereka, dari sisi ekonomi, masyarakat lokal tidak jarang masih mengalami kesulitan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal menjadi penting mengingat masyarakat lokal umumnya menjalani kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-

nilai dan kebiasaan yang telah mengakar. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan, masyarakat lokal sering kali masih menghadapi keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebagai contoh, masyarakat pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dapat didorong untuk mengembangkan usaha pengolahan hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan melalui kegiatan kewirausahaan.

Untuk tujuan peningkatan atau penguatan ekonomi masyarakat tersebut melalui kegiatan wirausaha, tentu perlu dirancang persiapan-persiapan atau langkah-langkahnya. Secara umum, tahapan yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pelatihan usaha

Pada tahap ini, setiap peserta diberikan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep kewirausahaan dengan semua permasalahan yang ada didalamnya. Tujuannya agar peserta memperoleh wawasan lebih menyeluruh dan aktual sehingga melahirkan kesanggupan membangun usaha.

2. Pendampingan

Pada tahapan ini, ketika usaha dijalankan, masyarakat diberi pendampingan oleh tenaga profesional yang berfungsi sebagai pengarah dan pembimbing sehingga usaha yang digeluti benar-benar mampu dikuasai.

3. Permodalan

Permodalan merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha. Dalam hal ini, penambahan modal dari lembaga keuangan sebaiknya diberikan bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan. Peserta dapat diberikan pengetahuan terkait mekanisme dan cara-cara pemerolehan permodalan dari lembaga keuangan untuk mendukung kegiatan wirausaha kegiatan wirausaha mereka.

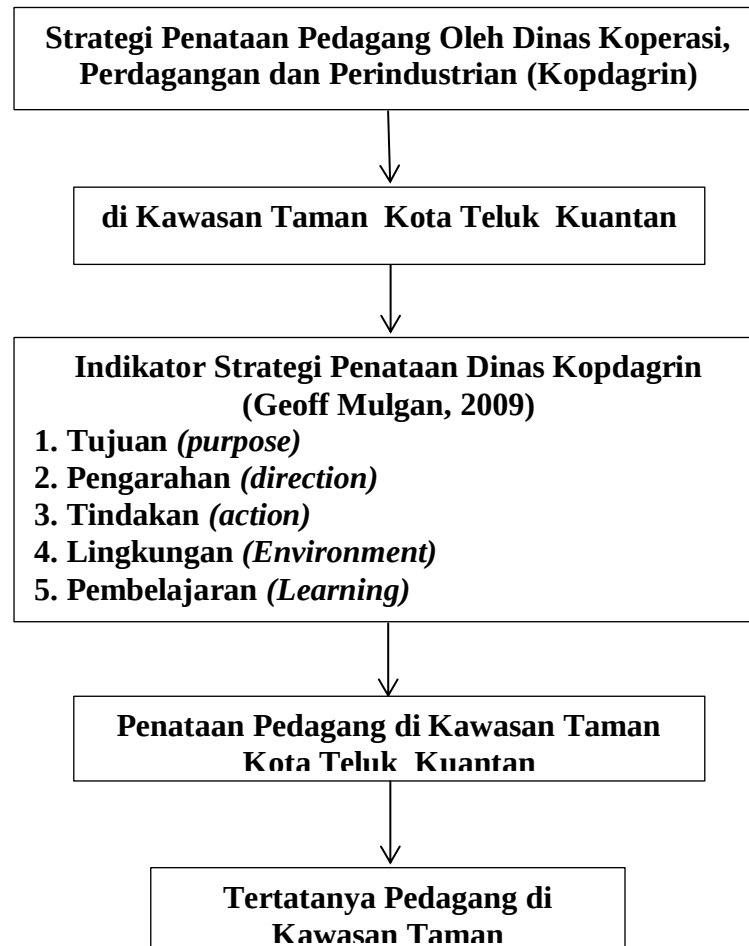
4. Pembentukan jaringan bisnis

Melalui berbagai tahapan pembinaan yang konsisten, sistematis, dan berkelanjutan, selanjutnya diperlukan pembentukan *networking* bisnis. Pada tahap ini, peserta diberi bekal tidak semata akses jaringan bisnis, tetapi juga bagaimana mempertahankan dan mengembangkan jaringan bisnisnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang cara teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Maka kerangka teori dalam penelitian ini peneliti modifikasi berdasarkan teori strategi pemerintahan Geoff Mulgan (2009). Maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai berikut

Gambar/Bagan 2.1 :Kerangka Pemikiran Penelitian tentang Strategi Penataan Pedagang di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2025

2.3 Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian “Strategi Penataan Pedagang di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi” adalah karena jika strategi penataan pedagang tidak dilakukan dengan strategi yang tepat maka penataan pedagang tidak tertata, fungsi taman terganggu, ketertiban dan kenyamanan terganggu, serta keestetikan taman juga akan menurun.

2.4 Definisi Operasional

Strategi penataan dalam penelitian ini merujuk pada rangkaian perencanaan, tindakan, dan pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Kopdagrin untuk mengatur lokasi, zonasi, dan aktivitas pedagang di kawasan Taman Kota demi tercapainya lingkungan yang tertib dan sehat. Untuk memudahkan arah penelitian yang diajukan oleh penelitian serta menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah-istilah yang di pergunakan maka perlu dioperasionalkan konsep sebagai berikut :

2.4.1 Tujuan yang dimaksud adalah sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Kopdagrin dalam penataan pedagang agar fungsi ruang publik Taman Jalur tetap optimal. Dalam penelitian ini, tujuan dioperasionalkan melalui kejelasan rumusan tujuan, kesesuaian dengan regulasi, dan relevansi dengan kebutuhan lapangan seperti keteraturan, estetika, dan kenyamanan sosial.

2.4.2 Pengarahan adalah proses penyampaian instruksi, pedoman, serta kebijakan penataan yang dilakukan oleh Dinas Kopdagrin kepada instansi pelaksana dan pedagang. Dioperasionalkan melalui pedoman teknis, standar operasi, mekanisme informasi dan koordinasi instruktif internal maupun eksternal.

2.4.3 Tindakan merupakan bentuk implementasi nyata strategi penataan pedagang yang dilakukan di lapangan. Dalam penelitian ini, tindakan mencakup pendataan, zonasi, relokasi, penyediaan fasilitas, serta aturan tata tertib.

2.4.4 Lingkungan adalah kondisi sosial, ekonomi, dan respons masyarakat yang mempengaruhi keberhasilan strategi. Dalam penelitian ini, lingkungan dioperasionalkan melalui tingkat penerimaan kebijakan oleh pedagang dan pengunjung, munculnya potensi konflik, dampak penataan terhadap kenyamanan publik, dan perubahan kondisi ekonomi pedagang setelah kebijakan diterapkan.

2.4.5 Pembelajaran adalah proses evaluasi, penyesuaian, dan perbaikan kebijakan berdasarkan implementasi strategi. *Learning* di operasionalkan melalui mekanisme evaluasi yang dilakukan pemerintah, penerimaan masukan dari masyarakat dan pedagang, indentifikasi hambatan dan keberhasilan, serta tindak lanjut perbaikan strategi untuk tahap berikutnya.

2.5 Operasional Variabel

Tabel 2.1 : Operasional Variabel Penelitian tentang Strategi Penataan Pedagang di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Ukur
Strategi (Mulgan, 2009)	1. Tujuan (<i>purpose</i>)	a. Kejelasan tujuan penataan pedagang	Likert
		b. Arah yang ingin dicapai (ketertiban, estetika, kenyamanan)	Likert
	2. Pengarahan (<i>direction</i>)	a. Sosialisasi kebijakan kepada pedagang	Likert
		b. Koordinasi dan arahan kepada pelaksana (dinas terkait)	Likert
	3. Tindakan (<i>action</i>)	a. Penetapan zonasi	Likert
		b. Relokasi dan Penertiban	Likert
	4. Lingkungan (<i>environment</i>)	a. Kondisi sosial dan ekonomi pedagang	Likert
		b. Kondisi lingkungan fisik kawasan Taman pasca penataan	Likert
	5. pembelajaran (<i>learning</i>)	a. Evaluasi kebijakan penataan pedagang	Likert
		b. Penyesuaian strategi berdasarkan temuan dilapangan	Likert

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *mixed method*, Creswell dalam buku Dermawan (2024 : 160), menyatakan bahwa penelitian *mixed method* merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini berguna untuk menggambarkan fenomena yang kompleks, dapat melihat perbandingan antar kasus, dan penelitian ini mampu menganalisis hasil gabungan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif sehingga data akan semakin jelas dan saling melengkapi.

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian campuran dengan metode *eksplanatoris sekuensial* menurut Creswell 2011 (dalam Dermawan dkk, 2024 : 174), desain ini merupakan pendekatan dimana peneliti mengumpulkan data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan data kualitatif untuk menjelaskan atau mendalami hasil dari data kuantitatif tersebut. Penelitian ini berguna ketika peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai hasil yang diperoleh dari analisis kuantitatif.

Sehingga peneliti menggunakan desain ini karena untuk mengetahui bagaimana strategi penataan pedagang di kawasan Taman Kota Teluk Kuantan. Hal yang perlu dilakukan oleh peneliti pertama kali untuk mendapatkan data tersebut dengan menggunakan penelitian kuantitatif yang ditujukan pada pedagang di kawasan taman yang dapat memberikan gambaran proses strategi penataan pedagang yang dilakukan pada pedagang yang ada di kawasan taman

oleh Dinas Kopdagrin. Kemudian setelah mendapatkan data di atas maka peneliti melanjutkan penelitian kualitatif dengan tujuan melakukan eksplorasi lebih dalam mengenai strategi penataan pedagang di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan strategi *eksplanatoris sekuensial*. Desain penelitian ini bermaksud untuk mengetahui data berdasarkan hasil kuantitatif dan untuk mengeksplorasi lebih dalam menggunakan data kualitatif.

Menurut Sugiyono (2017 : 7), Metode penelitian Kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada *filsafat positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian atau kuisioner, analisis data berifat *statisti*, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Menurut Sugiyono (2017 : 8), Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode *etnographi*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

3.2 Responden Penelitian

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2018 : 80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan definisi populasi di atas maka yang menjadi subjek dalam

penelitian ini adalah pedagang yang ada di kawasan taman Kota Teluk Kuantan berdasarkan tabel jumlah pedagang berikut.

Tabel 3.1 : Jumlah Pedagang di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Dagangan	Jumlah
1	Minuman	19
2	Bakso/Pentol	13
3	Mochi	2
4	Sushi	2
5	Telur congkel	1
6	Kelapa Muda	5
7	Donat	4
8	Kebab	3
9	Risol mayo	2
10	Jamur crispy	9
11	Singkong meledak	1
12	kacang rebus	1
13	Bakpao	1
14	Telur Gulung	8
15	kentang Goreng	5
16	Ceker Bakar	4
17	Jeruk Nipis	5
18	Mie	6
19	Tahu Crispy	5
20	Pizza	1
21	Seblak	3
22	Cireng	1
23	Chicken Roll	1
Jumlah		102

Sumber : Data Lapangan, 2025

3.2.2 Sampel

Sugiyono (2018 : 81), sampel adalah bagian dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk mempermudah dalam memperoleh besaran sampel, maka penulis menentukan sampel dengan rumus slovin berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dimana :

n : Jumlah sampel

N : Populasi

E : Persepsi akibat kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (15% = 0,15)

Maka :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{102}{1 + 102 (0,15)^2} = \frac{102}{1 + 2,295} = \frac{102}{3,295} = 30,95 = 31 \text{ (digenapkan)}$$

Tabel 3.2 : Sampel Dari Jumlah Populasi Pedagang di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Responden	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Pedagang	102	31	94%
Jumlah		102	31	94%

Sumber : Diolah Oleh Peneliti Sendiri

3.2.3 Informan

Informan adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui dan atau terlibat langsung dalam fokus permasalahan yang memberikan keterangan/informasi yang penting dalam permasalahan yang ada di lapangan. Menurut Hendarsono (dalam sugiyono, 2015 : 171), informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

Tabel 3.3 : Jumlah Informan Penelitian Strategi Penataan Pedagang Di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

No	Unsur Responden	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Kepala Dinas Kopdagrin	1	1	3%
2	Kepala Bidang Perdagangan	1	1	3%
Jumlah		2	2	6%

Sumber : Diolah Oleh Peneliti Sendiri

Tabel 3.4 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Strategi Penataan Pedagang Di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

No	Unsur Responden	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Kepala Dinas Kopdagrin	1	1	3%
2	Kepala Bidang Perdagangan	1	1	3%
3	Pedagang	102	31	94%
Jumlah		104	33	100%

Sumber : Diolah Oleh Peneliti Sendiri

Maka dalam penelitian ini peneliti mengambil unsur responden dari kepala Dinas Kopdagrin, kepala bidang perdagangan Dinas Kopdagrin dan Pedagang di Taman Kota Teluk Kuantan.

Metode menentukan informan bagi Kepala Dinas dan jajarannya yang penulis gunakan adalah teknik purposive sampling. *purposive sampling* Menurut Sahir (2021 : 36), adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti.

Metode pengambilan sampel untuk pedagang penulis ambil adalah metode pengambilan sampel dari populasi secara acak. Menurut Sahir (2021 : 34), *simple random sampling* adalah pengambilan sampel tanpa memperhatikan strata yang

ada dalam populasi dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel.

3.3 Sumber Data Penelitian

3.3.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2018 : 456), data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian. Peneliti menggunakan hasil wawancara dan kuisioner yang didapatkan dari informan mengenai topic penelitian sebagai data primer

3.3.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018 : 456), data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen dan sumber yang sudah ada seperti buku, jurnal, artikel berita, laporan lembaga resmi, data statistik dari BPS, dan lain-lain. Data dan informasi yang diperlukan tersebut digunakan untuk menyusun landasan penelitian guna memperjelas permasalahan yang diteliti, yang juga diperoleh dari instansi-instansi dalam penelitian ini.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai Strategi Penataan Pedagang ini dilakukan di kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Kuisioner

Menurut Sugiyono (2018 : 142), kuisioner merupakan teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab dan suatu teknik pengumpulan data dengan menyusun daftar pertanyaan (angket), untuk selanjutnya disebarkan kepada masyarakat secara acak sebagai responden atau sampel dalam penelitian.

3.6.2 Wawancara

Menurut esterberg (dalam sugiyono, 2020 : 304), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3.6.3 Observasi

Menurut Sutrisno (dalam Sugiyono, 2020 : 166), observasi merupakan proses yang kompleks suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

3.6.4 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2020 : 314), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokuemen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung dan lain-lain.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Kuantitatif

Menurut Sugiyono (2018 : 245), menyatakan bahwa teknik analisis data adalah upaya mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi suatu yang diolah, mencari dan menemukan pola. Menemukan yang paling berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan. Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu, semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan yang akan digunakan dalam pelaksanaan penulisan ini. Setelah data terkumpul tentunya diberikan penjabaran terhadap data tersebut dengan menggunakan persentase.

Adapun skala likert untuk melakukan penelitian, dengan menggunakan rumus :

$$\text{Interval} = \frac{\text{Nilai Skor Tertinggi} - \text{Nilai Skor Terendah}}{\text{Banyak Kelas}}$$

Untuk itu, dalam memberikan penganalisaan menggunakan teknik data kuantitatif yaitu data yang dijabarkan ke dalam bentuk angka-angka. Yang skor berdasarkan skala likert berikut:

SB	: Sangat Baik	diberi skor 5
B	: Baik	diberi skor 4
CB	: Cukup Baik	diberi skor 3
KB	: Kurang Baik	diberi skor 2
TB	: Tidak Baik	diberi skor 1

Untuk menjabarkan data kuantitatif ke dalam bentuk angka-angka tersebut, maka digunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Jumlah Total} = \text{Jawaban Responden} \times \text{Skor}$$

Setelah data diolah dan didapat hasilnya, untuk mengetahui hasil olahan data berada pada posisi dimana. Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut (Sugiyono, 2019 : 148) :

1,00 – 1,80 = Tidak Baik

1,81 – 2,60 = Kurang Baik

2,61 – 3,40 = Cukup Baik

3,41 – 4,20 = Baik

4,21 – 5,00 = Sangat Baik

Setelah data terkumpulkan, penulis memisahkan dan melaporkan data tersebut menurut jenisnya dan di sajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase. Dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kuantitatif yaitu memberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti, dengan menganalisa secara seksama lalu menarik kesimpulan dan pada akhirnya mmberikan saran-saran.

3.6.2 Kualitatif

Analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Hubberman, aktivitas dalam analisis data yaitu *Data Reduction*, *Data Display*, *Conclution Drawing/Verification*. Berikut penjelasan mengenai tiga tahapan terebut. (Sugiyono, 2017 : 246)

3.6.2.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data dengan cara membuang bagian yang tidak relevan serta mengorganisasi data hingga menghasilkan gambaran yang jelas bagi peneliti untuk menarik kesimpulan. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan ditulis dalam uraian yang jelas dan lengkap yang nantinya akan direduksi, dirangkum, dan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan penelitian kemudian dicari tema atau pola (melalui proses penyuntingan, pemberian kode, dan pembuatan tabel).

3.6.2.2 Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian atau grafik sehingga peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan menentukan langkah selanjutnya berdasarkan data tersebut.

3.6.2.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dilakukan dengan menemukan makna data yang telah disajikan. Dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Penarikan dilakukan dengan cara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data berlangsung, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan dan hal-hal yang sering timbul.

3.6.3 Metode Campuran

3.6.3.1 Deskripsi Data Kombinasi/Campuran

Data kombinasi pada penelitian ini merupakan pencampuran antara data kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan instrumen strategi penataan pedagang di kawasan taman kota teluk kuantan yang ditujukan kepada pedagang. Kemudian data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan persentase. Berdasarkan penelitian kuantitatif tersebut peneliti tidak berhenti pada penelitian kuantitatif saja akan tetapi peneliti melanjutkan penelitian lebih dalam dengan metode kualitatif. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi lebih dalam mengenai strategi penataan pedagang di kawasan taman kota teluk kuantan. Adapun hal yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif adalah berpedoman pada data kuantitatif yang dilanjutkan dengan penggalian data melalui teknik wawancara semistruktur pada kepala dinas kopdagrin dan kepala bidang kopdagrin yang telah ditetapkan sebelumnya.

Oleh karena itu data kombinasi merupakan pencampuran data kuantitatif dan pencampuran data kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan informasi sedalam-dalamnya sampai data benar-benar jenuh dan mendapatkan hasil temuan yang akurat.

3.6.3.2 Analisis Data Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif

Penelitian ini menggunakan analisis data strategi *eksplanatoris sekuensial*. Proses pencampuran (*mixing*) data dalam strategi ini terjadi ketika hasil awal kuantitatif menginformasikan proses pengumpulan data kualitatif. Menurut

Creswell (dalam Dermawan 2024 : 163), menegaskan bahwa bobot atau prioritas lebih diberikan pada data kuantitatif. Adapun langkah-langkah strategi *eksplanatoris sekuensial* yang dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap pertama peneliti mengumpulkan data kuantitatif berupa instrumen atau kuisioner strategi penataan pedagang di kawasan taman kota teluk kuantan yang ditujukan kepada para pedagang.
2. Tahap kedua, peneliti melakukan analisis data kuantitatif dengan menganalisis hasil instrumen atau kuisioner strategi penataan pedagang di kawasan taman kota teluk kuantan menggunakan penjabaran angka-angka persentase.
3. Tahap ketiga, mengumpulkan data kualitatif dengan teknik wawancara secara semistruktur.
4. Tahap keempat, dengan melakukan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif sampai hasil temuan data benar-benar jenuh. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
5. Tahap terakhir dengan melakukan interpretasi keseluruhan data. Pada langkah terakhir peneliti mendiskusikan data kuantitatif dan kualitatif dengan cara memaparkan data hasil temuan kuantitatif, kualitatif, dan *mixed method*. Kemudian peneliti memberikan penjelasan secara mendalam terhadap hasil temuan penelitian strategi penataan pedagang di kawasan taman Kota Teluk Kuantan.

3.7 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian tentang Strategi Penataan Pedagang di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3 : Jadwal Penelitian Strategi Penataan Pedagang Di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2025-2026																			
		Okt				Nov				Des				Jan				Feb			
1	Persiapan dan Penyusunan Proposal			x	x		x	x	x												
2	Seminar Proposal									x											
3	Perbaikan Proposal									x	x	x									
4	Penelitian di Lapangan												x	x	x						
5	Pengelolaan dan Analisis Data															x	x	x	x		
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi																	x		x	x
7	Ujian Skripsi																				x
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																				x
9	Penggandaan Serta Penyerahan Skripsi																				

Sumber : Diolah Oleh Peneliti Sendiri

4.1.2 Kondisi Geografi Kuantan Singingi

Secara astronomis, Kuantan Singingi terletak antara Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00'-1°00' Lintang Selatan dan 101°02'-101°55' bujur timur Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas-batas : Utara – Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Selatan – Provinsi Jambi, Barat – Provinsi Sumatera Barat, Timur – Kabupaten Indragiri Hulu. Kuantan Singingi terdiri dari 15 Kecamatan yaitu Kuantan Mudik, Hulu Kuantan, Gunung Toar, Pucuk Rantau, Singingi, Singingi Hilir, Kuantan Tengah, Sentajo Raya, Benai, Kuantan Hilir, Pangean, Logas Tanah Darat, Kuantan Hilir Seberang, Cerenti, dan Inuman.

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya adalah beberapa kecamatan dibawah Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi. Saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi sebuah Kabupaten definitif yang mempunyai 15 kecamatan.

Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan:

1. Teluk Kuantan – Lubuk Jambi : 22 Km
2. Teluk Kuantan – Lubuk Ambacang : 33 Km
3. Teluk Kuantan – Kampung Baru : 10 Km
4. Teluk Kuantan – Pangkalan : 70 Km
5. Teluk Kuantan – Muara Lembu : 35 Km
6. Teluk Kuantan – Koto Baru : 52 Km

7. Teluk Kuantan – Koto Sentajo : 8 Km
8. Teluk Kuantan – Benai : 10 Km
9. Teluk Kuantan – Baserah : 36 Km
10. Teluk Kuantan – Koto Rajo : 45 Km
11. Teluk Kuantan – Pangean : 30 Km
12. Teluk Kuantan – Perhentian Luas : 48 Km
13. Teluk Kuantan – Cerenti : 60 km
14. Teluk Kuantan – Inuman : 47 Km

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6° Celsius 36,5° Celsius dan suhu minimum berkisar antara 19,2° Celsius – 22° Celsius. Curah hujan pada 2015 berkisar antara 25,57 – 498,70 mm per tahun

4.2 Gambaran Umum Kota Teluk Kuantan

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan Provinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam.

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km² , yang berada pada posisi antara 0°00 - 1° 00 Lintang Selatan dan 101° - 02 - 101° 55 Bujur Timur. Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah Selatan dengan Propinsi Jambi
3. Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat
4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Dilihat dari batas – batas kabupaten yang langsung berbatasan dengan 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi Jambi dan Sumatera Barat . Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kuantan Singingi apabila dapat memanfaatkan peluang yang ada.

4.2.1 Luas Wilayah

Kota teluk kuantan memiliki luas wilayah 53 Km² yang terdiri dari tiga desa dan tiga kelurahan. Kota Teluk Kuantan yang sedang mengalami perkembangan di samping ibu kota kecamatan dan juga sebagai ibukota kabupaten Kuantan Singingi.

Kota Teluk Kuantan selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi juga berfungsi sebagai pusat sosial ekonomi dan pembangunan di berbagai sektor, seperti : sektor industri, perdagangan, pendidikan dan lain sebagainya. Ditinjau dari letak geografisnya kota teluk kuantan memiliki letak yang strategis karena terletak di persimpangan jalan dan merupakan daerah yang mudah di kembangkan.

4.2.2 Iklim

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6°C – 36,5°C dan suhu minimum berkisar antara 19,2°C – 22,0°C. Curah hujan antara 229,00-1.133,0 mm per tahun dengan keadaan musim berkisar :

1. Musim hujan jatuh pada bulan September s/d Februari
2. Musim kemarau jatuh pada bulan Maret s/d Agustus

4.3 Taman Kota Teluk Kuantan

Taman Kota Teluk Kuantan yang berada di tepian narosa merupakan salah satu taman yang ada di Teluk Kuantan dari 9 taman kota yang ada. Taman ini terletak di tengah Kota Teluk Kuantan tepatnya berlokasi di Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Taman ini mempunyai material landscape atau vegetasi dan material pendukung atau elemen keras. Material landscape yang ada di taman ini yaitu pohon, perdu, semak, tanaman penutup tanah, dan rumput, sedangkan material pendukung yang ada di taman ini seperti adanya kolam, bangku taman yang terbuat dari beton, jalan setapak, perkerasan, lampu taman. Taman ini memiliki 4 pintu masuk yang dapat memudahkan pengunjung untuk memasuki taman. Taman ini dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai dengan orang tua atau lansia. Taman yang terletak dipinggir jalan raya ini bisa diakses dengan mudah, namun tidak adanya area parkir membuat pengunjung harus memarkirkan kendaraan mereka dipinggir jalan.

Pohon yang ada ditaman ini terdiri dari pohon kamboja, pohon jeruk, pohon beringin, pohon labu kayu, pohon kiara payung, pohon jarak, pohon pucuk merah, pohon ketapang, pohon palam ekor tupai, pohon pulai, dan pohon mangga. Perdu yang ada di taman ini terdiri dari bunga bougenvile, bunga rombusa mini, dan kaktus. Semak yang ada di taman ini yaitu bakung, tanaman penutup tanah di taman ini yaitu tanaman krokot. Rumput yang ada di taman ini adalah rumput gajah.

4.4 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian

Berdasarkan peraturan Daerah kabupaten Kuantan Singingi nomor 4 tahun 2016 yaitu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang jadi wewenang daerah di bidang koperasi usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian.

4.4.1 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi perdagangan Dan Perindustrian

Kepala Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai fungsi :

1. Perencanaan dibidang Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang Koperasi UKM,

Perdagangan dan Perindustrian

3. Pemberian kajian teknis perizinan dan atau rekomendasi;
4. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Koperasi UKM, Industri dan Perdagangan;
5. Pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi UKM, Industri dan Perdagangan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

4.4.2 Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, pembina kepegawaian rumah tangga dan perlengkapan, kewawasan serta keuangan, sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Program dan Keuangan

4.4.3 Kepala Bidang Koperasi dan UKM

Kepala Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembina pengawasan, evaluasi dan pelaporan pada seksi kelembagaan dan kemitraan, Bina Usaha Koperasi dan UKM, fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Koperasi dan UKM mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah;
- b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah;
- d. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Perumusan kebijakan teknis dibidang bina kelembagaan dan kemitraan, bina usaha Koperasi dan UKM, fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam;

1. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang bina usaha Koperasi dan UKM, fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang bina kelembagaan dan kemitraan, bina usaha Koperasi dan UKM, fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam;
3. Pelaksanaan pembiayaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bina usaha kelembagaan dan kemitraan, bina usaha Koperasi dan UKM, fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.4.4 Kepala Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan Bidang Bina Usaha Perdagangan, Informasi Pasar dan Promosi, Metrologi dan Perlindungan Konsumen.

Bidang Perdagangan terdiri dari beberapa seksi :

- a. Seksi Bina Usaha Perdagangan
- b. Seksi Informasi Pasar dan Promosi
- c. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Usaha Perdagangan, Informasi Pasar dan Promosi, Metrologi dan Perlindungan Konsumen;
- b. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran dibidang Usaha Perdagangan, Informasi Pasar dan Promosi, Metrologi dan Perlindungan Konsumen;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang Bina Usaha Perdagangan, Informasi Pasar dan Promosi, Metrologi dan Perlindungan Konsumen;
- d. Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Bina Usaha Perdagangan, Informasi Pasar dan Promosi, Metrologi dan Perlindungan Konsumen;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

4.4.5 Kepala Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan kerjasama Industri.

Bidang Perindustrian terdiri atas beberapa seksi :

- a. Seksi Bina Usaha Industri.
- b. Seksi Pembinaan, Permodalan dan Kerjasama Industri.
- c. Seksi Pengawasan Industri

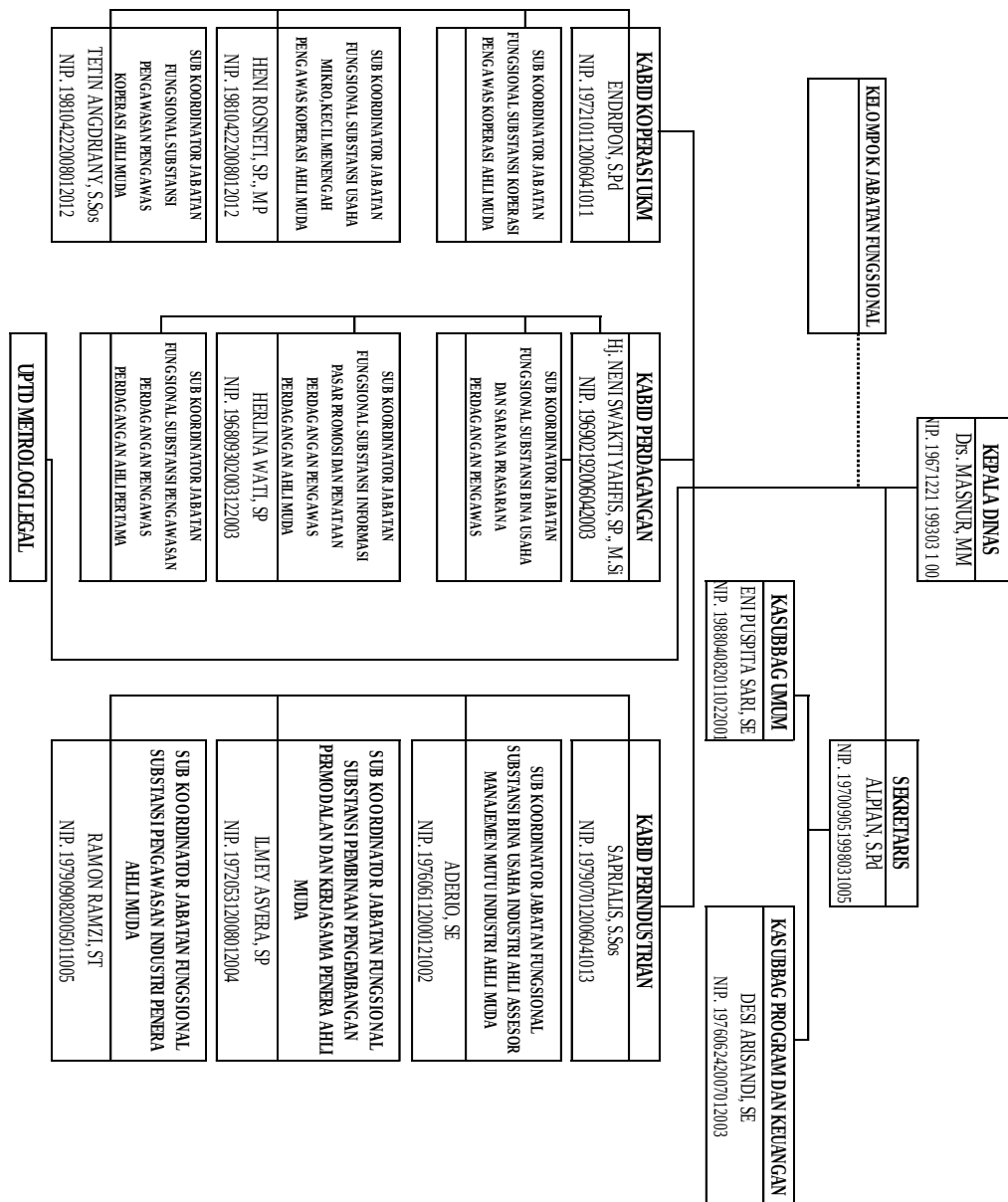
Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang bina usaha Industri, pembinaan pengembangan permodalan dan kerjasama Industri, pengawasan Industri
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang usaha Industri, pembinaan, pengembangan permodalan dan kerjasama Industri;
- c. Pengorganisasian pelaksanaan tugas dibidang Industri, pembinaan, pengembangan permodalan dan kerjasama Industri;
- d. Pelaksanaan pembinaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang usaha Industri, pembinaan, pengembangan permodalan dan kerjasama Industri;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.5 Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM, Perdagangan, dan Perindustrian

Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Dinas Koperasi UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Tahun 2026

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil koesioner, wawancara serta observasi lapangan mengenai Strategi Penataan Pedagang di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Strategi Penataan Pedagang di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi secara umum berada pada kategori cukup baik.

6.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan sebagai masukan terhadap Strategi Penataan Pedagang di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan penataan pedagang, terutama dalam penetapan zonasi, relokasi, dan penertiban pedagang agar tercipta keteraturan kawasan taman.
2. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi kepada pedagang serta menyediakan fasilitas pendukung yang memadai di tempat relokasi agar aktivitas berdagang dapat berjalan dengan baik.
3. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat menetapkan strategi penataan pedagang yang permanen dan konsisten agar penataan pedagang dapat berjalan lebih terarah.
4. Bagi Pedagang diharapkan dapat mematuhi aturan penataan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah serta menjaga kebersihan dan

ketertiban kawasan taman sehingga tercipta lingkungan yang nyaman bagi masyarakat.

5. Bagi Peneliti selanjutnya di sarankan agar lebih memperdalam penelitian ini dengan indikator dan metode penelitian yang berbeda juga.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdoellah, 2016. *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Allison, Miichael, 2013. *Perencanaan Strategi Bagi Organisasi Nirlaba*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Anggara, S, 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arafiq, dkk, 2024. *Harmonisasi Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Semarang: CV Lawwana.
- Arifudin, O., Rahmat, A., & Nurlatifah, S, 2020. *Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi*. Purwokerto: CV Pena Persada.
- Danar, R. O, 2022. *Teori Governance*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- David, F. R, 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Dermawan, dkk, 2024. *Metode Penelitian Campuran (Mix Method)*. Mediun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia
- Handayani, A., & Sarwono, E. A, 2021. *Buku Ajar Manajemen Strategi*. Surakarta: Percetakan Kurnia Solo.
- Hayat, 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Ibrahim, R, 2024. *Kebijakan Publik: Teori, Analisis, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: K-Media.
- Ilyas, dkk, 2023. *Manajemen Strategi*. Pasaman Barat: CV Azka Pustaka.
- Karso, J. A, 2024. *Buku Ajar Pemerintah Nasional*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Kuswandoro, 2024. *Kebijakan Publik Perspektif Politik: Advokasi Civil Society dan Kepartaian*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Lawang, R. M. Z, 2005. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: UI Press

- Malau, A. N, 2024. *Kebijakan Publik*. Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Mulgan, G, 2009. *The Art of Public Strategy – Mobilizing Power and Knowledge For the Common Good*. New York. Oxford University Inc.
- Mustanir, A., dkk, 2023. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Widina Media Utama.
- Nugraha, dkk, 2022. *Teori Administrasi*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Pahlevi, C., & Musa, M. I, 2023. *Manajemen Strategi*. Makassar: Penerbit Intelektual Karya Nusantara.
- Sahir Hafni Syafrida, 2021. *Metodologi penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia
- Sedarmayanti, 2012. *Good Governance dan Good Corporate*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siagian, P. Sondang, 2012. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetami, 2012. *Perencanaan dan Perancangan Kota*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Widjaja, 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Pasal 35 Tentang Tata Ruang
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

C. INTERNET

(<https://dpmptsp.kuansing.go.id/id/page/profil-kuantan-singingi.html>), Accessed on February 18 2026

(<https://kotajalur.kuansing.go.id/id/blog/taman-jalur-teluk-kuantan.html>), Accessed on February 18 2026

KOESIONER PEDAGANG

**Judul : Strategi Penataan Pedagang di Kawasan Taman Kota Teluk
Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi**

A. KETENTUAN

1. Angket ini tidak bertujuan politik, melainkan hanya untuk mencari/mendapatkan data-data penelitian mengenai Strategi Penataan Pedagang di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi
2. Hasil dan jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i, dalam angket ini akan sangat dijaga kerahasiaannya, karena kejujuran dalam menjawab sangat kami harapkan.
3. Bacalah pertanyaan berikut dengan teliti, beri tanda silang pada salah satu jawaban yang sesuai dengan kondisi dan pemikiran Bapak/Ibu/ Sdr/i alami.
4. Atas keikhlasan dan keluangan untuk menjawabnya diucapkan terima kasih, semoga ridho Allah SWT yang menyertai aktifitas Bapak/Ibu/Sdr/i.

B. IDENTITAS PENELITI

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1. Nama | : Misel Sulastu Ningsih |
| 2. NPM | : 220411049 |
| 3. Program Studi | : Administrasi Negara |
| 4. Fakultas | : Ilmu Sosial |
| 5. Universitas | : Islam Kuantan Singingi |
| 6. Jenjang | : Strata Satu (S1) |

C. IDENTITAS RESPONDEN

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. No hp | : |
| 2. Nama | : |
| 3. Tempat/Tanggal Lahir | : |
| 4. Jenis Kelamin | : |
| 5. Pendidikan | : |
| 6. Usia | : |
| 7. Pekerjaan | : |

D. PETUNJUK PENGISIAN KOESIONER

Bacalah pertanyaan dengan teliti dan ceermat, beri tanda bulat (0) atau silang (x) pada salah satu jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Sdr/i paling benar. Dengan kriteria pilihan jawaban sebagai berikut :

- a. Sangat Baik
- b. Baik
- c. Cukup Baik
- d. Kurang Baik
- e. Tidak Baik

E. DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN TENTANG STRATEGI PENATAAN PEDAGANG DI KAWASAN TAMAN KOTA TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

F. Indikator Tujuan (*Purpose*)

1. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i sejauh mana tujuan penataan pedagang disampaikan secara jelas oleh pemerintah kepada pedagang?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
2. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i sejauh mana tujuan penataan pedagang diarahkan untuk menciptakan ketertiban, keindahan, dan kenyamanan kawasan Taman?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik

G. Indikator Pengarahan (*Direction*)

3. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i sejauh mana sosialisasi penataan pedagang dilakukan sebelum kebijakan diterapkan?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
4. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i sejauh mana petugas lapangan melaksanakan arahan penataan pedagang sesuai dengan ketentuan?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik

H. Indikator Tindakan (*Action*)

5. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i sejauh mana pemerintah daerah telah menetapkan zonasi yang jelas bagi pedagang di kawasan Taman??
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
6. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i sejauh mana proses relokasi dan konsistensi pemerintah dalam melakukan penertiban pedagang di kawasan taman?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik

I. Indikator Lingkungan (*Environtment*)

7. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i sejauh mana penataan pedagang memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi pedagang?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
8. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i sejauh mana kondisi kawasan taman (kebersihan, fasilitas, kenyamanan) lebih tertata setelah penataan pedagang dilakukan?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik

J. Indikator Pembelajaran (*Learning*)

9. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i sejauh mana pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan penataan pedagang?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
10. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i sejauh mana pemerintah daerah melakukan penyesuaian kebijakan penataan pedagang berdasarkan kondisi di lapangan?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

**Judul : Strategi Penataan Pedagang di Kawasan Taman Kota Teluk
Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi**

**Kepada : Dinas Koperasi UKM, Perdagangan, dan Perindustrian
Kabupaten Kuantan Singingi**

A. IDENTITAS PENELITIAN

Nama	: Misel Sulastu Ningsih
NPM	: 220411049
Program Studi	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial
Universitas	: Islam Kuantan Singingi
Jenjang	: Strata Satu (S1)

B. IDENTITAS RESPONDEN

No hp	:
Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Pendidikan	:
Usia	:
Pekerjaan	:

C. PETUNJUK

1. Daftar pertanyaan ini hanya dimaksud untuk penilaian skripsi dan tidak merugikan siapapun dan dimaksudkan untuk syarat pengumpulan data informasi sehubungan dengan penulisan penelitian ilmiah.
2. Wawancara ini tidak mengundang unsur politik
3. Hasil wawancara dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait terutama penulis.
4. Identitas Bapak/Ibu/Sdr/I dijamin kerahasiaannya
5. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Sdr/I saya ucapkan terima kasih.

D. PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN TENTANG STRATEGI PENATAAN PEDAGANG DI KAWASAN TAMAN KOTA TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

A. Indikator Tujuan (*purpose*)

1. Apakah tujuan penataan pedagang telah disampaikan dengan jelas kepada pedagang?
.....
.....
.....
2. Apa arah utama penataan pedagang yang ingin dicapai?
.....
.....
.....

B. Indikator Pengarahan (*direction*)

3. Bagaimana bentuk sosialisasi kebijakan penataan pedagang yang dilakukan kepada para pedagang?
.....
.....
.....
4. Bagaimana koordinasi dan arahan yang diberikan kepada petugas pelaksana dalam penataan pedagang di kawasan Taman Kota Teluk Kuantan?
.....
.....
.....

C. Indikator Tindakan (*action*)

5. Bagaimana mekanisme penetapan zonasi pedagang di kawasan Taman Kota Teluk Kuantan?
.....
.....
.....

6. Bagaimana proses relokasi atau penertiban pedagang dilakukan oleh pemerintah daerah?

.....
.....
.....

D. Indikator Lingkungan (*environment*)

7. Apa dampak penataan pedagang terhadap kondisi sosial dan ekonomi pedagang menurut pemerintah?

.....
.....
.....

8. Bagaimana kondisi lingkungan fisik kawasan Taman Kota Teluk Kuantan setelah penataan pedagang dilakukan?

.....
.....
.....

D. Indikator Pembelajaran (*learning*)

9. Apakah pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kebijakan penataan pedagang di kawasan Taman?

.....
.....
.....

10. Bagaimana hasil evaluasi tersebut digunakan untuk melakukan penyesuaian strategi penataan pedagang ke depannya?

.....
.....
.....

No	Pertanyaan										Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1		2		3		4		5		
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
1	4	5	2	4	4	3	4	5	5	4	40
2	4	4	4	4	3	3	2	4	4	4	36
3	3	4	3	4	2	3	2	5	3	4	33
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
5	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	34
6	4	4	4	4	3	3	2	4	4	4	36
7	5	5	4	4	3	3	3	5	4	4	40
8	5	5	4	4	3	3	3	5	4	4	40
9	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	36
10	4	4	4	3	3	3	3	5	4	4	37
11	3	3	3	4	2	2	2	3	2	2	26
12	4	4	4	3	3	4	2	4	4	4	36
13	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	28
14	3	4	3	4	3	4	2	4	3	2	32
15	4	4	4	4	3	3	3	5	4	4	38
16	4	5	4	4	3	3	3	4	5	4	39
17	2	2	4	2	1	1	2	1	1	3	19
18	4	5	4	5	2	3	2	4	4	4	37
19	2	4	4	2	1	2	1	4	4	4	28
20	3	4	3	4	2	2	3	5	3	3	32
21	3	5	2	3	3	3	4	4	3	3	33
22	4	2	3	4	3	3	2	4	3	3	31
23	4	4	4	3	2	3	3	4	4	4	35
24	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	36
25	4	4	4	3	2	3	3	4	4	4	35
26	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	37
27	5	4	4	4	3	3	2	4	4	4	37
28	2	4	4	3	3	4	2	3	5	3	33
29	4	4	4	4	3	4	3	5	4	4	39
30	4	5	4	4	3	3	3	4	5	4	39
31	2	2	1	2	3	1	3	3	2	1	20
	112	122	109	108	84	90	81	123	114	109	1052
	234		217		174		204		223		

Dokumentasi Penelitian di Dinas Koperasi UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi

1. Dokumentasi Dengan Kepala Dinas Kopdagrin



2. Dokumentasi Dengan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Kopdagrin



Dokumentasi Penelitian Dengan Pedagang di Kawasan Taman Kota Teluk
Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi









YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 09/Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Memperhatikan :** Berdasarkan hasil rapat senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pembimbing I : Sarjan M, S.Sos., M.Si
NIDN : 1008128002
Pembimbing II : Sahri Muharam, S.Sos., M.Si
NIDN : 1021117906

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Misel Sulastu Ningsih
NPM : 220411049
Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang di Kawasan Taman Jajir di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 11 AGUSTUS 2025
Dekan,

RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN: 1030058402

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Administrasi Negara
2. Mahasiswa
3. Arsip



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Teluk Kuantan, 23 Desember 2025

Nomor : 146/FIS/UNIKS/XII/2025
Lamp. : -
Perihal : **Permohonan Riset**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Misel Sulastu Ningsih
NPM	: 220411049
Fakultas	: Ilmu Sosial
Program Studi	: Administrasi Negara
Semester	: VII (Tujuh)

Saat ini mahasiswa yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) sebagai berikut :

Judul Penelitian	: Strategi Penataan Pedagangan di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kab. Kuantan Singingi
Lokasi Penelitian	: Di Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian (KOPDAGRIN) dan Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan.

Untuk keperluan riset tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu agar berkenan kiranya memberi izin penelitian, wawancara dan data yang diperlukan mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.


SARIAN M. S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002
*DEKAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Email : kopdagrin17@gmail.com, Website : diskopdagrin.kuansing.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 000/Kopdagrin-Sekre/II/2026/131

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Misel Sulastu Ningsih
NIM : 220411049
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

Benar telah mengadakan Penelitian (Riset) di Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi untuk melengkapi data Skripsi yang berjudul: **"Strategi Penataan Pedagang di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi"**

Demikianlah Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Teluk Kuantan, 23 Februari 2026
Kepala Dinas Koperasi UKM, Perdagangan
dan Perindustrian


Drs. Masnur, MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19671221 199303 1 003



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JL. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.
0760-561655, e-mail. Unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : MISEL SULASTU NINGSIH

NPM : 220411049

DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing : 1. SARJAN.M, S.Sos.,M.Si
2. SAHRI MUHARAM S.Sos.,M.Si

JUDUL : STRATEGI DINAS KOPDAGRIN DALAM
PENATAAN PEDAGANG DI KAWASAN TAMAN JALUR
KOTA TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf Pembimbing		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
1	28/10/2025	1. lembar bimbingan 2. Margin 3. kata pengantar		→	
		4. Judul dispesifik 5. lebih fokus Penataan. 6. Bhs asing miring			
		7. penataan 8. jadwal Penelitian 9. Daftar pustaka			
		10. tabel Informan.			
2	5/11/2025	1. Judul 2. kutipan 3. kerangka pemikiran		→	
		4. Daftar pustaka 5. Informan.			

3	18/11 2025	ACC Uta di cikan Pn			
	26/11-2026	Partijen latar B/c muncul foto di Duma Jalur, Pn Lugar da pl. Bong.			
		Dusangka Teoni			
		Sebagai dg Sam			
	28/11-2026	Daftar Daftar is perbaiki penomoran			
		Acc. Uta di Uji			



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.
0760-561655, e-mail. Unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MISEL SULASTU NINGSIH

NPM : 220411049

DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing : 1. SARJAN M, S.Sos., M.Si

2. SAHRI MUHARAM S.Sos., M.Si

JUDUL : STRATEGI PENATAAN PEDAGANG DI
KAWASAN TAMAN KOTA TELUK KUANTAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf Pembimbing		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
	20/1-2026	Can Tuttlean Turlap			
	10/3 2026	Duraker Data			
		kesimpulan			
		Abstract			
		Biodata			
		da penelitian			
		Kat persepsi			

 Dipindai dengan CamScanner



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07Kebun Nenas jake Telp.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 12

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Misel Sulastu Ningsing

NPM : 220411049

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Strategi Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian dalam Penataan Pedagang
di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Hari/Tgl Ujian : Rabu / 10 Desember 2025

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1. 
2.	Alsar Andri, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2. 
3.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3. 
4.	Sahri Muharam, S.Sos., M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4. 

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Form 11

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

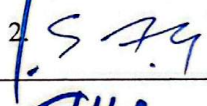
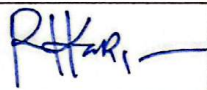
PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Misel Sulastu Ningsih
NPM : 220411049
Program Studi : Administrasi Negara
Judul : Strategi Penataan Perdagangan di Kawasan Taman Kota Teluk Kuantan
Kab. Kuantan Singingi

Hari/Tgl Ujian : Kamis/ 21 Mei 2026

Dinyatakan sudah melakukan Revisi atas Skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1. 
2.	Sahri Muharam, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2. 
3.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Anggota 1	3. 
4.	Rika Ramdhanti, S.IP., M.Si	Anggota 2	4. 
5.	Risvandi, S.Pd.I., M.Si	Anggota 3	5. 

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Misel Sulastu Ningsih
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Pantai, 13 September 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Pantai
Alamat Email : miselsulastuningsih@gmail.com
Pendidikan :
1. Tahun 2016 Lulus SD Negeri 019 Pantai
2. Tahun 2019 Lulus SMP Negeri 4 Kuantan Mudik
3. Tahun 2022 Lulus SMK Negeri 2 Teluk Kuantan

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Teluk Kuantan, 13 Maret 2026

Penulis



MISEL SULASTU NINGSIH
NPM. 220411049